

# Moderasi Beragama

pada Masyarakat Multietnik  
dan Transmigrasi



Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd.  
Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I.

Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd.  
Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I.

# Moderasi Beragama

pada Masyarakat Multietnik  
dan Transmigrasi

 Penerbit  
**litrus.**

---

**Moderasi Beragama pada Masyarakat  
Multietnik dan Transmigrasi**

---

Ditulis oleh:

**Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd.**  
**Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku  
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Desember 2023

Editor: Niswatul Azizah  
Perancang sampul: An Nuha Zarkasyi  
Penata letak: An Nuha Zarkasyi

**ISBN : 978-623-114-275-7**

vi + 94 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Desember 2023

## Kata Pengantar

---

Dalam dinamika keragaman sosial yang melibatkan masyarakat multietnik dan transmigrasi, konsep moderasi beragama memegang peran penting sebagai landasan yang mendasari kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif. Moderasi beragama tidak hanya menjadi sebuah strategi, melainkan juga sebuah filosofi yang menggambarkan kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan beragama di tengah pluralitas budaya dan etnis. Sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman yang mendalam, toleransi, dan saling penghormatan antarberagama, moderasi beragama menjadi perekat sosial yang kuat, memungkinkan masyarakat multietnik dan transmigrasi untuk hidup bersama dalam keberagaman tanpa kehilangan esensi khas budaya dan keberagaman agama masing-masing.

Dalam konteks masyarakat multietnik, moderasi beragama bukan hanya tentang mengelola perbedaan keyakinan, tetapi juga menggali potensi keberagaman sebagai sumber kekuatan bersama. Dengan merangkul prinsip-prinsip moderasi beragama, masyarakat dapat mengatasi potensi konflik dan membangun fondasi yang kokoh untuk kerja sama lintas etnis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga urusan sosial. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan pola pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik dan transmigrasi, tidak hanya menjadi suatu inovasi lokal, tetapi juga kontribusi berharga dalam menghadapi tantangan global terkait kerukunan antarumat beragama dan keberlanjutan hidup bersama dalam keragaman.



# Daftar Isi

---

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar .....  | iii |
| Daftar Isi.....   | v   |
| <b>BAB I</b>  |     |
| Prawacana: Moderasi Beragama pada Masyarakat Multietnik dan Transmigrasi..... | 1   |
| <b>BAB II</b>   |     |
| Kajian Konseptual Moderasi.....   | 9   |
| Pengertian dan Batasan Moderasi .....   | 9   |
| Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang .....                              | 12  |
| Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama.....                           | 15  |
| <b>BAB III</b>  |     |
| Konsep Dasar Moderasi Beragama.....   | 31  |
| Pengertian Moderasi Beragama .....  | 31  |
| Landasan Moderasi Beragama .....  | 35  |
| Karakteristik Moderasi Beragama .....   | 38  |
| Berasaskan ketuhanan .....  | 39  |
| <b>BAB IV</b>   |     |
| Masyarakat Multietnik.....  | 43  |
| Definisi Masyarakat Multietnik.....   | 43  |
| Perubahan Sosial Masyarakat Multietnik.....                                   | 45  |
| Masalah-masalah sosial dalam Masyarakat Multietnik.....                       | 50  |

## **BAB V**

Aspek-Aspek Transmigrasi..... 59

Dimensi Historis Transmigrasi.....59

Kebijakan dalam Transmigrasi.....61

Tujuan Program Transmigrasi.....63

## **BAB VI**

Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah.....67

Peran Transmigrasi dalam Pengembangan Wilayah.....67

Stadia-Stadia Pembangunan Transmigrasi.....69

Kawasan Transmigrasi sebagai Wilayah Fungsional .....72

## **BAB VII**

Analisis Moderasi Beragama pada Masyarakat  
Multietnik dan Transmigrasi.....75

## **BAB VIII**

Konklusi Kajian .....87

Daftar Pustaka .....91

# BAB I

## Prawacana: Moderasi Beragama pada Masyarakat Multietnik dan Transmigrasi

---

**K**ebhinekaan, sebagai kekayaan budaya yang menandai identitas bangsa Indonesia, melibatkan beragam aspek seperti suku, ras, etnik, agama, seni, adat istiadat, bahasa, dan daerah. Manajemen yang efektif terhadap kebhinekaan ini akan menghasilkan berkah bagi Indonesia, memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antarsegmen masyarakat (mutualisme). Sebaliknya, jika kebhinekaan tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber perpecahan dan konflik yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia (Haryanto, 2013).

Keragaman budaya dan agama masyarakat Indonesia, yang diwakili dalam konsep kebhinekaan, semakin tersebar merata ke berbagai pulau besar di Indonesia melalui program transmigrasi. Program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendistribusikan penduduk ke berbagai wilayah, terutama di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini telah berlangsung sejak tahun 1950-an dengan tujuan utama mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di daerah-daerah lain.

Sejak masa Orde Baru hingga program Pelita II, tujuan transmigrasi tidak hanya terbatas pada pemerataan penduduk, melainkan juga mencakup upaya pemenuhan tenaga kerja dalam proyek pembangunan di



daerah-daerah yang mengalami kekurangan sumber daya manusia. Secara umum, perpindahan masyarakat dari pulau Jawa, Bali, dan Lombok ke wilayah transmigrasi didorong oleh faktor ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan transmigrasi memiliki dimensi ganda karena berhasil menyebarkan penduduk secara merata, mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, dan sekaligus memperluas usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mencakup baik masyarakat lokal maupun pendatang transmigrasi. Pemanfaatan sumber daya potensial yang berdayaguna sesuai dengan tujuan pelaksanaan transmigrasi dapat diperoleh melalui jaringan individual secara mandiri maupun secara kolektif yang terlembagakan sebagai modal sosial dalam masyarakat multietnik (Pierre Bourdieu, 1987).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, pemerintah telah melakukan persiapan yang mencakup beberapa aspek, seperti penetapan daerah transmigrasi, penyediaan lahan untuk usaha dan pemukiman, penyelesaian masalah pemilikan tanah, pembangunan prasarana jalan dan sarana angkutan, fasilitas produksi, pendidikan, serta prasarana sosial yang dibutuhkan di daerah transmigrasi. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mengintegrasikan transmigrasi dengan penduduk lokal setempat.

Sulawesi Tengah, sebagai salah satu provinsi yang menjadi fokus program transmigrasi di Indonesia, memiliki karakteristik unik dalam hal geografi, demografi, dan modal sosial. Dari segi geografis, provinsi ini dapat diakses melalui berbagai jalur darat, laut, dan udara, sementara juga menampilkan keragaman etnis, seni, bahasa, adat istiadat, dan agama. Selain itu, Sulawesi Tengah kaya akan sumber daya alam, terutama nikel. Provinsi tersebut juga dikenal sebagai wilayah dengan lahan subur yang dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Selama periode tahun 1981-2022, kehidupan masyarakat transmigrasi terus berkembang dan mengalami dinamika, termasuk terjadinya pembauran sosial antara masyarakat pendatang dari Jawa, Bali, dan

Lombok dengan Suku Bugis, Gorontalo, Manado, dan Suku Saluan sebagai penduduk asli mayoritas. Agama yang dianut sejak awal mencakup Islam, Kristen, dan Hindu. Meskipun tinggal di daerah transmigrasi, mereka tetap mempertahankan agama dan identitas budaya masing-masing.

Dalam konteks masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam, pembinaan moderasi beragama menjadi penting untuk menciptakan harmoni, toleransi, dan integrasi sosial antar umat beragama. Moderasi beragama membantu mengurangi potensi konflik, mempromosikan saling pengertian, menghormati, dan peduli, sehingga terbentuk sikap beragama inklusif antar masyarakat berbeda etnis.

Perbedaan agama di masyarakat multietnik transmigrasi dapat menimbulkan benturan, ketegangan, dan konflik sosial antarwarga. Perbedaan pemahaman agama, ritual keagamaan, dan nilai budaya menjadi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat multietnik transmigrasi. Konflik semacam ini berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kehadiran masyarakat multietnik transmigrasi menciptakan beragam tantangan dan peluang, terutama dalam konteks pembinaan moderasi beragama. Masyarakat multietnik transmigrasi, yang berbeda secara budaya dan agama, dapat menimbulkan potensi ketegangan berbau agama dan menghadapi masalah pada aspek perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat dengan penduduk lokal. Keragaman etnis juga membawa potensi konflik sosial, ketidaksetaraan, dan kesenjangan dalam aspek ekonomi.

Di samping itu, masyarakat multietnik transmigrasi mudah menghadapi tantangan integrasi sosial, ketegangan, dan diskriminasi budaya, terutama dalam konteks adaptasi terhadap budaya lokal, nilai-nilai, dan agama di daerah tujuan. Realitas ini dapat memicu konflik sosial yang berdampak negatif pada stabilitas sosial dan menyebabkan disharmoni antar komunitas agama yang berbeda.

Dalam rangka memahami dan mengatasi tantangan serta potensi konflik yang ada, pengkajian mengenai pembinaan moderasi beragama pada masyarakat multietnik transmigrasi adalah langkah relevan dan

kontekstual. Pengkajian ini dapat mempromosikan harmoni sosial melalui kerjasama mutualistik antar masyarakat multietnik transmigrasi di wilayah. Modal sosial masyarakat multietnik ini pada giliran dapat memperkuat integrasi dan stabilitas nasional bangsa Indonesia.

Pembinaan moderasi beragama dalam setting sosial masyarakat multietnik transmigrasi bertujuan untuk menciptakan budaya hidup yang damai dalam perbedaan, hidup berdampingan dengan saling menghormati, memahami, mendukung, dan saling memperkuat satu sama lain tanpa memandang perbedaan etnis dan agama. Kekuatan landasan sosial semacam ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta mendorong perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih maju di wilayah transmigrasi.

Dengan demikian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, forum keagamaan, organisasi sosial, pemimpin agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda memiliki peran penting dalam pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi, yang menjadi subyek penelitian ini. Kemitraan sinergis antara pemerintah dan masyarakat tercermin dalam penyelenggaraan berbagai program edukasi tentang toleransi, harmoni beragama, ceramah bernuansa moderat, interaksi kehidupan lintas agama, acara kebudayaan, pertunjukan seni, kompetisi bidang olahraga, dan pelatihan ekonomi kecil yang melibatkan berbagai etnis dan umat beragama secara setara.

Meskipun masyarakat multietnik transmigrasi memiliki potensi konflik atau ketegangan yang besar, pengkajian yang mendalam tentang pola pembinaan moderasi beragama pada masyarakat transmigrasi menjadi krusial. Dalam konteks ini, pembinaan moderasi beragama dianggap sebagai pendekatan untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antar budaya dan agama, serta mencegah radikalisme atau ekstremisme, yang sangat penting dilakukan.

Pembinaan moderasi beragama dapat memperkuat pemahaman agama yang lebih inklusif dan damai, baik antar kelompok etnis maupun agama yang berbeda. Program ini juga sejalan dengan inisiatif pemerintah

yang dijalankan oleh Kementerian Agama RI. Selain itu, pembinaan moderasi menjadi krusial untuk meredam politik identitas yang berfokus pada aspek agama, yang memiliki potensi memicu intoleransi dan kekerasan terhadap komunitas yang berbeda. Kondisi semacam ini rentan terjadi dalam masyarakat multietnik transmigrasi, dan kegiatan pembinaan moderasi beragama menjadi solusi yang diperlukan.

Pola pembinaan moderasi beragama pada masyarakat multietnik transmigrasi memerlukan transformasi pemikiran keagamaan dengan mengubah paradigma dari yang eksklusif menjadi inklusif dan pluralis. Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan inklusif dan dialog kultural menjadi strategi efektif untuk membina moderasi beragama. Melalui edukasi keragaman inklusif, masyarakat dapat memahami nilai-nilai keagamaan secara lebih toleran, moderat, dan terbuka. Sementara itu, dialog kultural membuka ruang diskusi terbuka untuk memahami persamaan dan perbedaan antarumat beragama.

Secara struktural, pranata dan sistem sosial seperti lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam upaya melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur untuk mencegah dampak negatif dari perkembangan dan percampuran etnis tersebut. Strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi munculnya masalah mencakup pendidikan yang menekankan pendekatan inklusif sesuai dengan muatan dan tujuan pendidikan nasional.

Pada tataran ideal, pendidikan memiliki peran dan fungsi penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat multietnik yang harmonis. Melalui pendidikan, setiap individu dari berbagai etnis dan agama diharapkan memiliki pemahaman dan sikap yang menghargai nilai-nilai agama, norma budaya luhur bangsa Indonesia, dan kearifan lokal sebagai etika sosial masyarakat multietnik.

Tujuan dan capaian hasil pendidikan tersebut diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Melalui penanaman pendidikan sejak dini, anak, remaja, orang tua, dan masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk berinteraksi serta menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga mencapai kesejahteraan hidup yang aman dan damai.

Dari pengamatan awal, terlihat bahwa masyarakat multietnik transmigrasi telah mengalami kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan sosial. Hal ini termanifestasi dalam pembangunan infrastruktur jalan utama yang beraspal, adanya rumah ibadah yang megah untuk semua agama, perumahan masyarakat yang besar dan terbuat dari beton, lembaga pendidikan yang lengkap, sentra-sentra perekonomian yang ramai, beragam momen seni budaya lintas agama yang inklusif, dan keterlibatan aktif para tokoh dalam merawat persatuan dan kebersamaan secara sinergis. Kondisi-kondisi tersebut menjadi indikator nyata keberhasilan masyarakat multietnik transmigrasi di wilayah ini dalam meningkatkan taraf hidup mereka dibandingkan dengan daerah asalnya.

Dengan demikian, pembahasan ini berusaha mengungkapkan dinamika dan pola pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi. Aspek-aspek yang dicakup melibatkan beberapa aspek, seperti aktivitas keagamaan masyarakat transmigrasi, pola interaksi sosial umat beragama, peran pemimpin agama, partisipasi pejabat pemerintah, dan peran tokoh masyarakat dalam pembinaan antarumat beragama. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor peluang dan tantangan dalam pembinaan moderasi beragama di wilayah ini.

Kajian ini memiliki relevansi sosial yang besar karena dapat membantu masyarakat multietnik transmigrasi dan pemerintah dalam

menjaga stabilitas dan perdamaian di daerah dengan keragaman etnisitas dan keagamaan yang tinggi. Kehidupan masyarakat multietnik yang toleran, damai, dan hidup saling berdampingan dalam perbedaan menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Pembahasan ini memiliki urgensi dalam mengungkapkan pola pembinaan moderasi beragama pada masyarakat multietnik transmigrasi.



# BAB II

## Kajian Konseptual Moderasi

---

### Pengertian dan Batasan Moderasi

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio* yang artinya adalah keseimbangan atau ketengahan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Istilah ini juga mencakup penguasaan diri untuk menghindari sikap yang berlebihan, baik kelebihan maupun kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Jika seseorang disebut bersikap moderat, itu berarti bahwa orang tersebut bersikap dengan wajar, normal, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, istilah *moderation* sering digunakan dengan arti rata-rata, inti, standar, atau tidak berpihak. Secara umum, “moderat” mencerminkan penekanan pada keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan karakter, baik dalam memperlakukan individu maupun berinteraksi dengan lembaga negara.

Dalam bahasa Arab, konsep moderasi disebut dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki makna yang sebanding dengan *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Seseorang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* dapat disebut sebagai *wasith*. Di dalam bahasa Arab, *wasathiyah* diartikan sebagai pilihan terbaik. Meskipun menggunakan berbagai kata, semuanya mengandung makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini mengacu pada pemilihan posisi tengah



di antara berbagai pilihan ekstrem. Bahkan, kata *wasith* telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata wasit dengan tiga makna, yaitu: 1) penengah, perantara (contohnya dalam perdagangan atau bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara pihak yang berselisih; dan 3) pemimpin dalam pertandingan.

Menurut ahli bahasa Arab, kata *wasath* juga memiliki arti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Contohnya, kata dermawan menunjukkan sikap yang berada di antara kikir dan boros, sedangkan kata pemberani mencerminkan sikap yang berada di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), serta masih banyak contoh lainnya dalam bahasa Arab. Lawan kata dari moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna ekstrim, radikal, dan berlebihan dalam bahasa Inggris. Kata ekstrem juga bisa merujuk pada tindakan yang keterlaluan, perubahan drastis, atau mengambil jalan yang berlawanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ekstrem didefinisikan sebagai paling ujung, paling tinggi, dan paling keras.

Dalam bahasa Arab, terdapat setidaknya dua kata yang memiliki makna yang sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw* dan *tasyaddud*. Meskipun kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebutkan dalam Alquran, tetapi turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, seperti *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Meskipun ketiga kata ini hanya menunjuk kepada kata dasarnya, yang berarti keras dan tegas, namun tidak satu pun dari ketiganya yang dapat dianggap sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks keagamaan, konsep berlebihan dapat diterapkan untuk merujuk pada individu yang bersikap ekstrem dan melampaui batas serta ketentuan syariat agama.

Dianalogikan, moderasi bisa diibaratkan sebagai gerakan dari pinggir yang selalu menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sementara ekstremisme adalah gerakan sebaliknya yang menjauhi pusat atau sumbu, menuju ke sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Bisa juga diibaratkan seperti bandul jam yang memiliki gerakan dinamis, tidak berhenti secara ekstrem di satu sisi luar, melainkan bergerak menuju tengah-tengah.

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah antara pilihan ekstrem yang ada. Di sisi lain, ekstremisme beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku yang melampaui batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Tentu diperlukan ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah suatu cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan merujuk pada sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini akan mencegah kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatisme, dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama adalah solusi untuk mengatasi dua kutub ekstrem dalam beragama, yaitu kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sejatinya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Memilih moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci untuk menjaga keseimbangan, demi memelihara peradaban dan menciptakan perdamaian. Dengan cara ini, setiap umat beragama dapat memperlakukan orang lain dengan hormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama dalam damai dan harmoni. Di dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bukan hanya sekadar pilihan, melainkan keharusan (Saifudin, 2019: 15).

## Prinsip Dasar Moderasi: Adil dan Berimbang

Salah satu prinsip fundamental dalam praktik moderasi beragama adalah menjaga harmoni antara dua aspek, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, keselarasan antara dimensi jasmani dan rohani, keseimbangan hak dan kewajiban, harmoni antara kepentingan individual dan kemaslahatan bersama, serta seimbangnya antara kewajiban yang diwajibkan dan kebaikan yang dilakukan dengan sukarela. Selain itu, moderasi beragama juga mengharuskan keseimbangan antara teks agama dan interpretasi ijtihad ulama, serta harmonisasi antara gagasan ideal dan realitas praktis, sambil tetap mempertahankan keseimbangan antara refleksi terhadap masa lalu dan pandangan terhadap masa depan.

Inti dari moderasi beragama adalah memperlakukan semua konsep yang berpasangan dengan cara yang adil dan seimbang, baik dalam pandangan, respons, maupun praktik. Dalam KBBI, istilah adil dijelaskan sebagai: 1) tidak memihak atau berat sebelah; 2) mendukung kebenaran; dan 3) tindakan yang sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sama halnya dengan seorang wasit yang memimpin pertandingan, moderasi beragama menganjurkan sikap yang tidak memihak, melainkan mengutamakan kebenaran.

Prinsip selanjutnya yaitu keseimbangan, merujuk pada sudut pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu mendukung keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Bersikap seimbang tidak berarti tidak memiliki pendapat; mereka yang mengadopsi sikap seimbang tetap teguh namun tidak tegas, karena selalu mengedepankan keadilan. Keberpihakan mereka tidak pernah melampaui batas sehingga tidak merugikan hak orang lain. Keseimbangan dapat diartikan sebagai cara pandang yang mengutamakan keseimbangan dalam melakukan sesuatu, tidak berlebihan atau kurang, tidak konservatif maupun liberal.

Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa dalam konsep moderasi (*wasathiyah*), prinsip keseimbangan (*balance*) dan keadilan (*justice*) mengandung makna bahwa dalam beragama, individu seharusnya tidak mengadopsi pandangan yang ekstrem, melainkan harus selalu

berusaha mencari titik temu. Kamali menekankan bahwa *wasathiyah* adalah aspek yang krusial dalam Islam, namun seringkali diabaikan oleh umatnya, meskipun sebenarnya *wasathiyah* adalah inti ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya nilai yang diajarkan oleh Islam, tetapi juga ada dalam ajaran agama lain. Secara lebih luas, moderasi dianggap sebagai kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan personal, keluarga, serta masyarakat, termasuk hubungan antarmanusia yang lebih luas.

Dua nilai utama, yaitu adil dan berimbang, dapat lebih mudah terwujud jika seseorang memperlihatkan tiga karakter pokok dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, yang selalu memilih jalan tengah, dapat lebih mudah diterapkan ketika seseorang memiliki pemahaman agama yang memadai untuk bersikap bijak, mampu menahan godaan sehingga dapat bersikap tulus tanpa beban, dan tidak egois dalam tafsir kebenaran sendiri sehingga berani mengakui perspektif kebenaran dari orang lain, serta berani menyampaikan pandangan berdasarkan ilmu.

Dengan formulasi lain, tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama adalah: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi agar tidak melampaui batas, dan selalu berhati-hati. Dalam simplifikasi, dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga kata kunci untuk mencapai moderasi beragama, yaitu: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Jika dijelaskan lebih rinci, kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat tambahan yang harus dimiliki sebagai prasyarat untuk moderasi beragama. Misalnya, pentingnya memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai ritual ibadah. Memahami secara menyeluruh hukum pelaksanaan ibadah dalam suatu agama dapat membantu umatnya dalam memilih alternatif jika diperlukan, namun tentu saja dengan prinsip bahwa hal tersebut bukan untuk meremehkan atau memperlakukan enteng praktik ritual keagamaan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan dalam pelaksanaannya. Meskipun

kondisi ini cukup sulit dipenuhi, mengingat asumsinya adalah bahwa umat harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Sebagai contoh, belum lama ini muncul penolakan terhadap imunisasi vaksin Campak Rubela (MR) dari sebagian kelompok beragama karena adanya ketidakpastian terkait hukumnya. Padahal, vaksin tersebut sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit campak dan rubela. Penolakan ini juga diperkuat dengan fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 yang menyatakan kebolehnya atau mubah, dengan dasar pada kondisi darurat syar'iyah, pendapat ahli yang kompeten, dan belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci hingga saat ini. Untuk melakukan moderasi antara kepentingan kesehatan dan pertimbangan keagamaan ini, tentu diperlukan pengetahuan komprehensif yang bersumber dari beragam pandangan tokoh agama.

Dengan pengetahuan keagamaan yang memenuhi kriteria di atas, seorang penganut agama dapat dengan mudah mengembangkan sifat terbuka, terutama dalam menghadapi keragaman dan perbedaan. Ini merupakan hakikat dari moderasi beragama. Di negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, pandangan moderasi beragama menjadi sangat krusial untuk memungkinkan dialog antar masyarakat, mengakomodasi beragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, serta tradisi dan adat istiadat lokal.

Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk tidak bersifat eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, dan bergaul dengan berbagai komunitas, sambil selalu belajar dan memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama mengajak setiap umat beragama untuk menghindari sikap ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, serta mengupayakan sikap adil dan berimbang untuk dapat hidup dalam kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara pada masa awal kemerdekaan, prinsip moderasi mampu menyatukan tokoh-tokoh kemerdekaan dengan

berbagai perbedaan dalam isi kepala, kepentingan politik, serta agama dan kepercayaan yang beragam. Mereka bersatu di tengah-tengah, mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dianggap sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa.

Sarjana Muslim, Ismail Raji al-Faruqi (w. 1986), mengelaborasi makna berimbang (*tawazun*) atau *the golden mean* sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, sambil berusaha mencari titik temu untuk menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindari mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain; mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang (Kamali 2015: 31).

Dalam era disrupsi teknologi dan informasi saat ini, di mana setiap individu menghadapi banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama dapat menjadi nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi dan meminimalisir berita bohong (*hoax*). Moderasi beragama memberikan pelajaran untuk berpikir dan bertindak bijaksana, menghindari fanatisme atau obsesi buta terhadap satu pandangan keagamaan individu atau kelompok tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya.

### **Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama**

Setiap agama mengajarkan konsep penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Pengabdian kepada Tuhan ini tercermin dalam kesiapan untuk mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak bersedia menjadi hamba bagi yang lain, dan juga tidak boleh diperhambakan oleh yang lain. Inilah inti dari nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Manusia, sebagai hamba Tuhan, diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi dengan keunggulan budi pikir. Pengelolaan bumi ini diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, menjadi salah satu visi kehidupan utama yang ditekankan oleh agama. Karena keterbatasan manusia, tugas ini diarahkan pada bangsa dan negara: bagaimana manusia mengelola bumi tempat tinggalnya agar tercapai kemaslahatan bersama, yakni terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini hadir dalam setiap agama sebagai keyakinan bahwa mencintai negeri adalah bagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama mengandung nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mencapai kemaslahatan di bumi Indonesia. Sikap mental yang moderat, adil, dan seimbang menjadi kunci penting dalam mengelola keragaman kita. Dalam berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Jika hal ini dapat diwujudkan, setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia yang utuh, sekaligus menjalankan agama dengan sepenuh hati.

Seperti telah disampaikan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah eksklusif bagi satu agama saja, melainkan hadir dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Prinsip adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga mendapat penghormatan tinggi dalam seluruh ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan perlakuan zalim atau mengajarkan sikap berlebihan.

Ajaran *wasathiyah*, seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata ini memiliki setidaknya tiga makna, yaitu: pertama, bermakna tengah-tengah; kedua, bermakna adil; dan ketiga, bermakna yang terbaik. Tiga makna ini tidak berdiri sendiri atau terisolasi satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Contoh yang mudah dimengerti dalam kehidupan sehari-hari adalah kata wasit, yang merujuk pada seseorang yang menengahi sebuah permainan, diharapkan selalu bertindak adil dan membuat keputusan terbaik bagi semua pihak. Contoh lainnya, seperti kedermawanan yang berada di tengah-tengah antara keborosan dan kekikiran, atau keberanian yang berada di tengah-tengah antara rasa takut dan sikap nekad.

Dari sejumlah tafsiran, istilah *wasatha* berarti dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal-hal duniawi atau akhirat. *Wasathiyah* juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, tetapi tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih rinci, *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam berbagai kajian, *wasathiyat* Islam sering diterjemahkan sebagai *justly-balanced Islam*, *the middle path*, atau *the middle way* Islam, di mana Islam berfungsi sebagai mediator dan penyeimbang. Istilah-istilah ini mencerminkan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan jalan tengah untuk menghindari ekstremisme dalam beragama.

Konsep *wasathiyat* sering dipahami sebagai mencerminkan prinsip-prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i`tidal*). Oleh karena itu, istilah *ummatan wasathan* sering digunakan sebagai *a just people* atau *a just community*, merujuk pada masyarakat atau komunitas yang adil.

Kata *wasath* juga umum digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, ia adalah orang yang *wasath*, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Sehingga, sebutan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* adalah suatu harapan agar mereka dapat menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi dan adil.

Islam mengajarkan sikap moderat baik dalam ibadah sebagai individu maupun dalam interaksi sosial sebagai anggota masyarakat. Prinsip ini



menjadi sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran, dan hadis Nabi. Salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ  
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa atribut *wasathiyah* yang diberikan kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan sosial dengan komunitas lain. Seorang individu atau komunitas muslim hanya dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) jika memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan pemahaman kata “wasath” dalam konteks moderasi, hal ini menuntut umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus menjadi objek penyaksian, menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai panutan yang dapat dijadikan teladan dalam setiap aktivitasnya.

Tingkat komitmen seseorang terhadap moderasi sejatinya mencerminkan sejauh mana komitmen mereka terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin besar

peluangnya untuk berlaku adil. Sebaliknya, semakin seseorang tidak moderat dan bersikap ekstrem, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. sangat mendorong umatnya untuk selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi menyatakan bahwa “Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.

Di Indonesia, konsep wasathiyah atau moderasi sering diuraikan melalui tiga pilar, yaitu: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan.

Pillar pertama, moderasi pemikiran, mencakup pemahaman keagamaan yang moderat. Ini ditandai oleh kemampuan untuk menyatukan teks dan konteks, artinya pemikiran keagamaan tidak hanya berfokus pada teks-teks keagamaan dan tidak memaksakan interpretasi baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis. Seorang yang memegang pemikiran keagamaan yang moderat tidak hanya bersandar pada teks, namun juga tidak akan terlalu liberal dan mengabaikan teks.

Pillar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan harus didasarkan pada ajakan yang berlandaskan pada prinsip perbaikan dan dilakukan dengan cara yang baik. Sebaliknya, mencegah kejahatan tidak boleh dilakukan dengan melakukan kejahatan baru, seperti kekerasan.

Pillar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yang melibatkan penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Agama dan budaya tidak dihadapkan secara diametral, melainkan keduanya saling terbuka untuk membangun dialog dan menghasilkan kebudayaan baru.

Diskursus moderasi bukanlah milik hanya tradisi Islam, tetapi juga dimiliki oleh agama lain, seperti Kristen. Terutama dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami penyesuaian dengan semangat kebangsaan Indonesia. Dengan berbagai tantangan

dan dinamika, tafsir ideologis kekristenan menemukan konteksnya di Indonesia dan menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila adalah landasan terbaik yang dapat menempatkan mereka sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pancasila dianggap sebagai pelindung dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Mereka meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara, memberikan jaminan bahwa setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk meyakini dan menjalankan keyakinan mereka masing-masing.

Moderasi beragama bukan hanya relevan untuk menciptakan relasi yang konstruktif antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga sangat penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal dalam agama dianggap tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Oleh karena itu, pengembangan moderasi beragama secara internal menjadi penting melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama dipandang sebagai cara untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang mungkin dipahami oleh sebagian umat. Salah satu strategi untuk memperkuat moderasi beragama adalah melalui interaksi maksimal antara agama satu dengan agama lainnya, serta antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Dalam Alkitab, keyakinan umat Kristiani menyatakan bahwa Yesus adalah sosok juru damai. Tidak ada catatan dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk menciptakan kerusakan, kekerasan, atau peperangan. Sebaliknya, banyak ayat dalam Alkitab yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika membahas konteks kedamaian antara lain melibatkan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Moderasi beragama juga tercermin dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja ini menyebut dirinya sebagai “persekutuan iman, harapan, dan cinta kasih”. Ketiga keutamaan ini, pada dasarnya satu, menjadi sikap dasar orang beriman. Iman menjadi pendorong hidup, memberi dasar kepada harapan, dan dinyatakan dalam kasih. Meskipun bersatu, namun ketiganya tidak sepenuhnya identik.

Gereja Katolik universal membangun perspektif baru dalam hubungannya dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili ini menjadi titik penting dalam memperkuat semangat inklusivitas agama dalam membentuk persaudaraan universal di era modern. Salah satu dekret penting dalam Konsili Vatikan II yang mencerminkan sikap Gereja terhadap agama-agama non-Kristen adalah *Nostrae Aetate*. Dekret ini secara khusus membahas hubungan Gereja dengan agama-agama non-Kristen, menegaskan bahwa “Gereja Katolik tidak menolak apa pun yang dalam agama-agama itu benar dan suci.”

Dengan sikap hormat yang tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran yang, dalam banyak hal, berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri. Namun, tidak jarang hal ini memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Melalui dekret *Nostra Aetate* (NA), Gereja telah membuka babak baru dalam sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan berusaha untuk membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama non-Kristen.

Dalam konteks Gereja Indonesia, tantangan terbesar adalah bagaimana membangun jembatan kokoh untuk menghubungkan “perbedaan” antaragama menuju persaudaraan nasional yang solid. Salah satu gagasan yang relevan adalah melalui dialog antarumat beragama, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antaragama yang sering kali dilanda konflik.

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara berbagai bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog, walaupun kadang-kadang juga melibatkan

konfrontasi. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan satu sama lain, seringkali melibatkan pengaruh satu terhadap yang lain. Pengaruh ini biasanya tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Oleh karena itu, banyak istilah dan rumusan dari satu agama juga digunakan dalam agama lain, tetapi seringkali dengan arti yang berbeda. Dengan demikian, penting untuk mengenal dan memahami agama-agama yang lain bukan hanya untuk dialog dan hubungan baik antaragama, tetapi juga agar lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan serta jati diri agama masing-masing.

Oleh Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani, moral, serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka” (NA.2). Konsili mengharapkan agar “dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematuhinya dengan gembira” (GS.92). Oleh karena itu, setelah Konsili Vatikan II, dialog antaragama diadakan di mana-mana.

Dalam sebuah dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri. Dengan tegas, Konsili Vatikan II menyatakan bahwa “di luar Persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG.8). Maka, dialog tidak hanya berarti hubungan baik antaragama. Dalam dialog, semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan.

Dalam Gereja Katolik, istilah “moderat” tidak biasa. Yang dipakai adalah “terbuka” terhadap “fundamentalis” dan “tradisionalis” (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-65; pertemuan semua – hampir 3.000 – uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih “moderat”.

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga, umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah.

Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah.

Dalam Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, Tuhan menjadi objek tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan kepada leluhur tetap dipertahankan sejak zaman prasejarah. Dewa-dewa utama dan spirit alam tidak bisa dikesampingkan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah leluhur, setelah era Parisadha, rupanya pencarian kebenaran menemukan kembali Tuhan sebagai objek pemujaan.

Tetapi pemujaan kepada leluhur menjadi bagian dari pengamalan ajaran agama di kalangan umat Hindu, terutama dalam mengatasi zaman modern. Pada waktu itu, digagas model pembinaan Sa Dharma atau enam

Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dharma Shanti. Bahkan, Dharma Gita menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia.

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Berjapa dengan mengucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebutuhan individu.

Praktik-praktik agama secara individu biasanya mengarusutamakan pelaksanaan ajaran agama yang lebih kontemplatif. Pada zaman Kali, yang identik dengan zaman modern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang pada umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai dengan watak (sifat) zaman Kali, mereka yang introvert (tertutup) akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif. Sedangkan bagi umat yang ekstrovert (terbuka) sudah disediakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama-sama memberi kepuasan batin yang maha luas.

Praktik agama telah mengalami moderasi sejak zaman Satya Yuga, dan Parisadha tampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama di akar rumput atau yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Oleh karena itu, dibuatlah program baru, yaitu grand design, sebagai upaya persiapan umat Hindu menghadapi dinamika sosial masyarakat di masa depan. Program ini mencakup konsep moderasi.

Tentu saja, moderasi yang diusung dalam grand design lebih kompleks dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Moderasi ini mengikuti

kerangka pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kompleksitas moderasi ini juga melibatkan aplikasi ajaran agama dengan nilai-nilai modernitas. Namun, disayangkan bahwa tidak ada agenda politik Hindu ke depan, padahal moderasi menuntut keterlibatan politik, sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi bahwa politik dan agama merupakan satu kesatuan.

Dalam konteks moderasi beragama, ajaran agama Hindu menekankan susila sebagai nilai penting, yang mencakup cara menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Kasih sayang dianggap sebagai hal utama dalam moderasi, dan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada intinya, umat Hindu secara penuh mendukung Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945), yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Kita dapat menemukan esensi ajaran moderasi beragama dalam tradisi agama Buddha, yang berakar pada pencerahan Sang Buddha, yaitu Sidharta Gautama, seorang guru dan pendiri agama Buddha. Meskipun lahir sebagai anak seorang raja, Sidharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yang melibatkan usaha menolong semua makhluk, menolak keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Tuhan dalam agama Buddha dikenal dengan beberapa nama, seperti Tathagatagarba (aliran Mahayana), Thian (aliran Tridharma), Nam-yoho-renge-kyo (aliran Nichiren), dan Sang Hyang Adi Buddha (aliran Mahayana-Aisvarika), yang biasa dipanggil oleh penganut Buddha di Indonesia. Dalam pandangan agama Buddha, Tuhan adalah kekosongan yang sempurna, sedangkan rezeki, pengaturan alam, dan tugas lainnya diemban oleh para dewa dan Bodhisattva. Para dewa ini adalah manusia biasa yang mengalami kesengsaraan, tetapi mereka memiliki kesaktian dan umur panjang meskipun tidak abadi.

Kemajuan teknologi yang tak terhentikan harus diartikan sebagai hikmah yang mendukung peningkatan kebahagiaan seluruh umat



manusia, sejalan dengan cita-cita agama Buddha yang menyatakan “*Isyo Jobutsu dan kosenrufu*,” yang berarti kebahagiaan seluruh makhluk dan membahagiakan seluruh makhluk. Oleh karena itu, kemajuan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan alat atau media yang harus dimanfaatkan untuk mencapai sebesar-besarnya kebahagiaan umat manusia dan alam semesta.

Risalah Buddha mengajarkan bahwa spirit agama adalah *Metta*, ajaran yang didasarkan pada cinta kasih tanpa pilih kasih dan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, solidaritas, dan kesetaraan, tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis ditekankan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, toleransi, dan kesetaraan. *Buddhadharma*, sebagai ‘jalan tengah’, menjadi aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang menghindari dua kutub ekstrem: penyiksaan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalusukhalikanuyoga*). *Buddhadharma* adalah jalan spiritualitas menuju kesucian yang membawa kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan.

Jalan tengah *Buddhadharma* adalah cara untuk mengatasi *dukkha* (penderitaan) dengan menyeimbangkan hawa nafsu dan egoisme, menuju tujuan hidup akhir berupa kebahagiaan sejati, *Nirvana*. Konsep *ahimsa*, yang merupakan spirit keagamaan Hindu, juga menjadi bagian dari ajaran ini, mengajarkan prinsip tanpa menggunakan kekerasan, seperti yang diterapkan oleh Mahatma Gandhi.

Moderasi beragama juga tertanam dalam tradisi agama *Khonghucu*. Umat *Khonghucu*, yang dianggap *junzi* (beriman dan luhur budi), melihat kehidupan melalui kaca mata *yin yang*, sebuah filosofi, pemikiran, dan spiritualitas yang menekankan sikap tengah, bukan ekstrem. Mereka memandang bahwa sesuatu yang kurang tidak lebih buruk daripada sesuatu yang berlebihan.

Tengah di sini bukanlah sikap tanpa prinsip, melainkan sikap yang ajeg dalam prinsipnya. Prinsip ini mengedepankan cinta kasih dan kemanusiaan (*ren*) serta keadilan dan kebenaran (*yi*). Manusia yang mengikuti prinsip ini, yang beriman dan memiliki budi luhur, akan selalu

bertindak sesuai dengan norma-norma susila (li) dan kebijaksanaan (zhi), menjadikannya individu yang dapat dipercaya (xin) dan berani (yong).

Seperti yang diungkapkan oleh Mengzi, “Seorang yang dapat bersikap Tengah, hendaklah membimbing orang yang tidak dapat bersikap tengah. Yang pandai hendaklah membimbing orang yang tidak pandai.” Artinya, orang yang memiliki sikap tengah seharusnya membimbing dan memberikan arahan kepada orang lain yang belum memiliki kedewasaan atau kebijaksanaan. Sebaliknya, jika yang memiliki sikap tengah menyia-nyaiakan yang tidak dapat bersikap tengah, atau yang pandai menyia-nyaiakan yang tidak pandai, maka perbedaan antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sebenarnya tidak signifikan.

Dalam konteks agama Khonghucu, sikap tengah ini diajarkan dan diwujudkan oleh para raja suci, nabi purba, dan tokoh-tokoh suci lainnya, yang kemudian dijadikan teladan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukanlah sekadar memegang satu haluan, melainkan memerlukan kemampuan untuk mempertimbangkan keadaan dengan bijaksana.

Dialog dan kerja sama dapat terwujud karena partisipan yang terlibat bersedia bersikap tengah, menghindari ekstremisme. Dalam konteks dialog dan kerja sama, prinsip jalan tengah sangat penting. Jalan tengah tidak selalu berarti mencapai kesepakatan; setuju untuk tidak setuju pun dapat dianggap sebagai bentuk jalan tengah. Keseluruhan proses pembangunan jalan tengah melibatkan sikap tengah.

Sikap tengah ini lahir dari kemampuan kita untuk terus berupaya menerima perbedaan, mengutamakan kebajikan, mengendalikan nafsu, mengurangi ego, dan menahan diri dari sikap keras kepala serta keinginan untuk mengalahkan atau menguasai pihak lain. Dengan demikian, dialog dan kerja sama yang berlandaskan pada sikap tengah mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, di mana keberagaman dihargai dan perbedaan diterima sebagai bagian dari dinamika yang memperkaya hubungan antarindividu.

Sebagai manusia, kita bukan hanya individu, tetapi juga makhluk sosial yang memiliki dimensi biologis dan spiritual. Keterbatasan waktu,

yang ditentukan oleh umur, dan pembatasan oleh tempat dan lingkungan adalah realitas yang melekat pada eksistensi manusia. Manusia tidak hanya berfungsi secara rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek emosional. Lebih dari itu, kita sebagai manusia tidak dapat terlepas dari hukum yin yang, yang merupakan aturan Tuhan.

Penting bagi manusia untuk memahami batasan-batasan ini karena kesadaran akan keterbatasan tersebut dapat mendorong kerja sama yang saling membangun. Upaya untuk menguasai manusia lain tanpa memperhatikan batasan-batasan ini bukanlah sikap yang mencerminkan kemanusiaan kita; bahkan, hal itu melampaui batas-batas kemanusiaan kita.

Sejalan dengan hukum Tuhan, sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga agar tetap berada dalam batas Tengah. Dengan mempertahankan posisi di batas Tengah, kita dapat mencapai keharmonisan. Keharmonisan ini dianggap sebagai cara manusia menempuh Dao, atau Jalan Suci, di dunia. Akibatnya, kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, dan segala makhluk serta benda akan terpelihara.

Seperti yang diungkapkan dalam Zhong Yong Bab Utama: 5, “Bila dapat terselenggara Tengah dan Harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara.” Dengan demikian, pemahaman dan pengamalan konsep Tengah dapat membawa kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh alam semesta.

Peperangan, penjajahan, perubahan iklim, ekstremisme, bom bunuh diri, perang dagang, keserakahan, keinginan untuk menguasai orang dan bangsa lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, hate speech, menegasikan dan membenci orang lain, merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, ketidakpahaman terhadap kebaikan pada hal yang kita sukai, serta banyak lagi, adalah dampak kegagalan kita untuk bersikap tengah dan harmonis, serta mengambil jalan tengah yang menjauhkan kita dari keadilan sosial (kesejahteraan), keharmonisan, dan perdamaian dunia.

Mengetahui asal-usul dan akhir, awal dan akhir, serta mana yang berlangsung sebelumnya dan sesudahnya adalah satu sikap yang menunjukkan kedekatan dengan dao. Seperti yang disampaikan dalam Zhong Yong Bab Utama: 3, “Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian, ia sudah dekat dengan dao (Jalan Suci).” Sikap tengah adalah manifestasi dari sikap tersebut.

Upaya untuk memahami dan menghargai keinginan orang lain memang memerlukan pengorbanan, yang terkadang tidak kecil. Namun, pengorbanan ini diperlukan untuk membangun hubungan yang harmonis. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Kongzi, “Yang dapat diajak belajar bersama belum tentu dapat diajak bersama menempuh dao (Jalan Suci), yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian paham.” (Lunyu. IX: 30).

Dalam tradisi Khonghucu, harmoni dihasilkan melalui perbedaan-perbedaan. Namun, untuk mencapai harmoni, setiap perbedaan tersebut harus hadir dalam proporsi yang tepat atau proporsional. Zhong atau Tengah merujuk pada segala sesuatu yang pas atau tepat, baik itu jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan, dan sebagainya. Zhong juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (dalam konteks waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (dalam konteks jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (dalam konteks posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (dalam konteks jarak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (dalam konteks bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (dalam konteks suhu), dan sebagainya.

Dengan kata lain, Zhong diartikan sebagai segala sesuatu yang pas atau tepat, atau yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang sesuai. Oleh karena itu, Zhong sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau disebut sebagai “di tengah waktu yang tepat.” Zhong berfungsi

untuk mencapai harmoni atau mengharmonikan segala yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.

Landasan moderasi dalam tradisi agama-agama di Indonesia juga mencerminkan prinsip-prinsip Zhong ini. Indonesia, yang secara kodrati majemuk, memiliki akar kultural yang kuat dan modal sosial sebagai dasar moderasi beragama.

# BAB III

## Konsep Dasar Moderasi Beragama

---

### Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an, yang artinya tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Moderat juga menggambarkan pengendalian diri dari sikap yang berlebihan maupun kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua makna, yakni mengurangi kekerasan dan menghindari keekstreman. Jika seseorang dikatakan bersikap moderat, itu berarti orang tersebut bersikap biasa, wajar, dan tidak ekstrem (Kemenag, 2019: 15).

Dalam konteks bahasa Arab, moderasi dapat dipahami dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki kesamaan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Seseorang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* dapat disebut sebagai *wasith*. Kata *wasith* bahkan telah diserap dalam bahasa Indonesia sebagai kata *wasit*, yang memiliki tiga pengertian, yaitu penengah atau perantara, pelerai/pemisah/pendamai, dan pemimpin dalam pertandingan.

Moderasi berasal dari kata moderat yang mengindikasikan pengambilan jalan tengah, yang berarti tidak condong ke kanan atau kiri. Sikap ini dianggap sebagai salah satu ciri keislaman. Banyak literatur yang mendefinisikan konsep Islam moderat, seperti pandangan as-Salabi yang menyatakan bahwa moderat (*wasathiyah*) memiliki banyak makna,

seperti berada di antara dua ujung, dipilih (*khiyar*), adil, terbaik, istimewa, dan sesuatu yang berada di antara baik dan buruk.

Selaras dengan as-Salabi, Kamali memberikan makna *wasatiyah* sebagai *tawassut* (tengah), *'itidal* (tegak lurus), *tawazun* (seimbang), dan *iqtishad* (tidak berlebihan). Di sisi lain, Qardlawi memberikan pengertian yang lebih luas kepada *wasatiyah*, termasuk keadilan, istiqamah (lurus), menjadi terpilih atau yang terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan (Ihsan & Abdillah, 2021).

Seorang Muslim yang tidak menyukai kekerasan, tidak memiliki kecenderungan ekstrem terhadap pihak yang dibela, tidak mengabaikan spiritualisme hanya untuk memperhatikan materialisme, menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan jasmani, serta tidak hanya peduli pada individu tetapi juga pada aspek sosial, dapat dianggap memiliki sifat-sifat *wasathiyyah* atau moderat (Maimun, 2019).

Istilah *wasathiyyah* memiliki makna yang cukup luas. Al-Qur'an sendiri menyebutkan kata tersebut atau sejenisnya berulang kali. Salah satu maknanya adalah keadilan, yang menjadi sifat dasar yang diperlukan oleh setiap insan. Khususnya ketika terkait dengan kesaksian dalam hukum, kehadiran saksi yang adil menjadi krusial. Tanpa keadilan seorang saksi dan keadilan dalam hukum, kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Keadilan di sini mencakup posisi di antara pihak-pihak yang bertikai, dengan menghindari kecenderungan pada salah satu sisi saja. Memberikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang menjadi esensi dari keadilan, tanpa adanya keberat sebelah.

*Wasathiyyah* tidak berarti sikap yang tidak tegas atau tidak jelas sama sekali terhadap segala sesuatu, seperti sikap netral yang pasif. Moderasi juga bukanlah sinonim dari *wasath*, yang berarti pertengahan, dan tidak harus diartikan sebagai pilihan yang tidak mendorong manusia untuk berusaha meraih kebaikan dan hal-hal positif seperti ibadah, ilmu, kekayaan, dan sebagainya. Selain itu, moderasi tidak mengindikasikan kelemahan atau kelembutan yang berlebihan (Shihab, 2019).

*Wasathiyyah* juga dapat bermakna lurus, yang mengacu pada keberadaan dalam berpikir dan bertindak yang benar, menjalani jalan yang benar dan terletak di tengah-tengahnya, menjauh dari maksud yang tidak benar. Oleh karena itu, dalam Islam, seluruh umat diajarkan untuk selalu berdoa agar diberikan jalan yang lurus dan terhindar dari jalan-jalan buruk yang dimurkai oleh Allah.

*Wasathiyyah* juga dapat diartikan sebagai kebaikan atau yang terbaik. Dengan demikian, Islam *wasathiyyah* diartikan sebagai Islam yang terbaik. Ungkapan ini sering digunakan oleh orang Arab untuk memuji seseorang yang memiliki nasab terbaik di sukunya, menyiratkan bahwa orang tersebut tidak berlebihan dalam keberagamaan dan tidak mengurangi ajaran agama.

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa *wasathiyyah* memiliki makna sebagai bentuk keseimbangan dalam segala persoalan hidup, baik duniawi maupun ukhrawi. Keseimbangan ini selalu harus diiringi oleh upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi, berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. *Wasathiyyah* dengan demikian, tidak hanya menyajikan dua kutub lalu memiliki apa yang ada di tengahnya.

*Wasathiyyah* diartikan sebagai keseimbangan yang diiringi prinsip tidak berlebihan maupun kekurangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa *wasathiyyah* bukanlah sikap menghindari dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab.

Moderasi beragama merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan dan penghayatan terhadap agama yang dianut, dengan memberikan ruang kepada individu atau kelompok agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka masing-masing. Individu yang memiliki karakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memperkokoh keyakinan dan melaksanakan ajaran agamanya, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat beragama lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka.



Penghormatan dan penerimaan terhadap umat beragama lainnya tercermin dalam hubungan dan interaksi sosial. Ini mencakup partisipasi dalam kegiatan sosial bersama, saling berhubungan, dan berinteraksi dengan baik, tanpa mengabaikan perbedaan keyakinan agama (Kemeng, 2019: 10).

Moderasi beragama diartikan sebagai sikap seimbang dalam menerapkan perintah agama, baik di antara sesama pemeluk agama Islam maupun antar pemeluk agama lainnya. Sikap moderasi tidak muncul begitu saja, tetapi dapat dibangun melalui pengembangan pengetahuan yang baik dan penerapan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar (Qasim, 2020: 40).

Moderat menginginkan cara beragama yang selalu berada di tengah, bukan di kanan atau kiri. Tidak hanya menghadapi ekstrem kanan, sehingga diidentikkan dengan liberal/kiri. Pandangan moderat ini tidak hanya mengajak kelompok kanan atau kiri untuk berbuat adil, tetapi juga menekankan pada kebutuhan keseimbangan. Sikap moderat mengharuskan respons terhadap kelompok kanan dan kiri, dengan melihat sisi negatif dan menariknya ke tengah agar dapat mewujudkan nilai-nilai yang seimbang dan saling menghormati (Ma'arif, 2020: 72).

Sesuatu yang sama tidak boleh dibeda-bedakan, begitu pun sebaliknya; adanya perbedaan tidak boleh disamakan. Dengan demikian, dapat tercipta saling penghargaan terhadap keanekaragaman, yang menjadikan keindahan tersendiri. Muncul sikap-sikap yang adil, saling menyayangi, dan toleransi, sebagai contoh. Toleransi sebenarnya adalah sikap menerima terhadap prinsip yang diyakini dan dianut orang lain, tanpa mengorbankan prinsip pribadi. Toleransi tidak hanya terjadi antar kelompok agama, melainkan juga di dalam suatu komunitas penganut agama. Sikap ini tidak hanya ditujukan kepada pemeluk agama lain, tetapi juga kepada sesama pemeluk agama Islam (Yusuf, 2002: 84).

Jika dikaitkan dengan Islam, moderat memiliki misi menjaga keseimbangan antara dua ekstremitas, yaitu antara pemikiran, pemahaman, pengamalan, dan Gerakan Islam fundamental dengan Islam liberal. Kedua

kutub ekstremitas ini sulit dipadukan. Oleh karena itu, Islam moderat berupaya mengembangkan kedamaian komprehensif dan holistik, menciptakan kedamaian di antara umat Islam sendiri maupun dengan umat-umat lainnya. Dengan demikian, Islam moderat bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan, keraguan, dan ketakutan dalam masyarakat (Qomar, 2021: 19).

Islam yang moderat telah berpengalaman dalam memainkan peran yang fleksibel menghadapi berbagai tantangan dan bentuk yang berbeda. Selain itu, Islam moderat juga mampu menanggapi kebiasaan atau tradisi yang telah berlangsung sejak dulu dalam masyarakat, menunjukkan kemampuan bertindak secara bijaksana. Islam Indonesia menunjukkan karakter yang menarik dan memikat sebagai rahmatan lil „alamin, menjauhkan diri dari radikalisme dan ekstremisme yang melanda dunia belakangan ini.

Agama bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan, namun di sisi lain, agama juga dapat menjadi sesuatu yang menakutkan bagi umat manusia. Ketika agama menciptakan hidup yang tentram, ia memberikan kenyamanan; tetapi sebaliknya, agama bisa menjadi sumber ketakutan ketika memicu saling curiga, serangan, bahkan pembunuhan antar individu. Meskipun agama atau kekerasan antaragama mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik, kekerasan global tampaknya diperparah oleh konflik antar ekstremis agama. Meskipun agama tampaknya menjadi penyebab kecenderungan kekerasan, pada saat yang sama, agama juga berfungsi sebagai sumber makna dan kepuasan pribadi bagi banyak orang di seluruh dunia (Ghufron, 2020). Oleh karena banyaknya faktor penyebab yang dapat menjadikan perpecahan dan kerusakan antar golongan manusia, maka moderasi beragama menjadi salah satu jawaban yang tepat untuk meredam gejolak yang terjadi.

## **Landasan Moderasi Beragama**

Moderasi beragama adalah nilai yang sangat sesuai untuk diterapkan demi kemaslahatan di Indonesia. Nilai-nilai karakter seperti moderat, adil,

dan seimbang dianggap sebagai kunci untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia. Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama serta setara dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis, sebagai upaya membangun bangsa dan negara.

Agama, termasuk Islam, telah lama memperhatikan prinsip ini. Islam, sebagai contoh, menyebut umatnya sebagai *ummatan wasathan*, harapannya agar mereka dapat menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Dalam Islam, konsep moderasi dijelaskan dengan beragam istilah, seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Ayat tersebut menyiratkan bahwa atribut wasathiyah yang dikaitkan dengan seorang warga Muslim harus diterapkan dalam konteks hubungan masyarakat dengan warga lain. Oleh karena itu, jika wasath dipahami dalam konteks moderasi, hal ini menuntut umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus menjadi objek perhatian, sehingga dapat menjadi teladan

bagi umat lain. Pada saat yang bersamaan, umat Islam memandang Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan yang patut ditiru, sebagai saksi yang membenarkan segala tingkah lakunya.

Ayat lain yang berkaitan dengan wasathiyah juga ada dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  
وَصَّوَّبَ إِلَيْهِ لِئَلَّا تَتَّقُوا

“Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”.

Selain terdapat dalam ayat al-Qur'an, nilai moderasi juga tercermin dalam al-Sunnah yang menunjukkan Nabi sebagai sosok yang menghargai nilai moderat. Ketika dihadapkan pada dua pilihan ekstrem, Nabi selalu memilih jalan tengah. Moderasi diartikan sebagai sikap pertengahan, yang mencerminkan keinginan untuk menjauh dari ekstremitas.

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menggambarkan pengajaran moderasi dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang cukup beragam. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya.

*“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad, dari Ibn Sihab ia mendengar Said al-Musayyab berkata: Saya mendengar Saad Bin Abi Waqash berkata; Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri.”* (HR. Muslim)

Melajang atau pengebiran, meskipun dijustifikasi sebagai urusan ibadah kepada Allah, adalah perbuatan yang tidak terpuji dan jelas dilarang. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan antara kepentingan

dunia dan akhirat. Pada saat itu, memperbanyak keturunan sangat dianjurkan sebagai kebutuhan penting untuk menambah pengikut umat Islam (Maimun, 2019).

Pancasila, sebagai ideologi negara yang menyatukan elemen bangsa Indonesia, juga merupakan dasar kehidupan nasional dan agama yang moderat. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan utama moderasi beragama dan nasional di Indonesia. Pancasila mampu mewujudkan visi negara pluralistik, yang berarti tidak ada agama tertentu yang memiliki hak khusus.

Sejak lahir pada 1 Juni 1945, Pancasila telah menjadi dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga Indonesia. Pancasila bukan hanya merupakan pondasi, semangat, dan dasar filosofi negara yang menyatukan berbagai bangsa, pulau, bahasa, dan agama ke dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menjadi jalan tengah dan solusi bagi kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara berdasarkan prinsip Islam atau negara sekuler.

Pancasila menempati posisi tengah antara ideologi Islam dan ideologi nasionalis Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan utama moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya prinsip harus diikuti dengan sikap tawasuth, i‘tidal, tasamuh, dan tawazun. Sikap moderat membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Dengan sikap rendah hati, dapat terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh idealisme agama yang didorong oleh radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat mencegah tindakan terorisme atas nama agama serta melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan, atau yang disebut al-dharuriyat al-khamsah.

### **Karakteristik Moderasi Beragama**

Karakter moderasi beragama memerlukan keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari kelompok individu. Oleh karena itu, setiap orang yang memeluk agama, suku, etnis, budaya, maupun lainnya harus saling

memahami satu sama lain, serta saling belajar untuk melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan.

Salah satu prinsip dasar dari ciri moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal. Contohnya, keseimbangan antara wahyu dan akal, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Moderasi beragama juga mencakup keseimbangan antara kebutuhan dan spontanitas, teks agama dan ijtihad para tokoh agama, cita-cita dan kenyataan, serta masa lalu dan masa depan. Ini adalah esensi dari moderasi beragama yang adil dan seimbang, yang perlu dihayati, diresapi, dan diimplementasikan.

Kedua nilai, yaitu adil dan seimbang, menjadi lebih mudah dibentuk apabila seseorang mempunyai tiga karakter utama: kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Dengan kata lain, sikap seimbang dalam agama selalu berada di jalan yang tengah. Sikap ini mudah dilaksanakan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk menjadi bijaksana, tidak ingin menang hanya dengan menafsirkan kebenaran orang lain, dan selalu berjalan netral dalam mengungkapkan pandangannya.

Dapat dikatakan bahwa terdapat tiga syarat untuk terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yaitu: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi agar tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, konsep karakter moderasi beragama dalam Islam dapat diwakili oleh tiga kata kunci: berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Selain itu, Islam menawarkan konsep karakter moderasi beragama melalui nilai-nilai seperti *tawazzun* (keseimbangan), *i'tidal* (lurus dan kokoh), *tasammuh* (toleransi), *musawwah* (egalitarian), *syura* (diskusi), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mengutamakan prioritas), serta *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif). Terdapat beberapa karakteristik moderasi menurut Islam yaitu (Kosim, 2019):

### **Berasaskan ketuhanan**

Moderasi yang dikonstruksikan oleh Islam bersumber dari wahyu Allah yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits nabi. Oleh karena

itu, dapat dipastikan bahwa sifat dan sikap moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari sifat Allah yang menyuruh untuk sederhana. Tuhan yang bijaksana, adil, dan sempurna mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Di situlah terdapat keistimewaan dari moderasi Islam yang berdasar pada fondasi ketuhanan.

1. Berlandaskan petunjuk kenabian

Hampir setiap tindakan yang dilakukan nabi mencontohkan ajaran moderasi dalam Islam. Dalam kesederhanaan hidup, beliau tidak terlalu fokus pada hal-hal duniawi, namun juga tidak meninggalkannya begitu saja. Ini merupakan contoh praktik hidup nabi. Beliau adalah manusia terbaik dan paling taat, tetapi tidak pernah berlebihan dalam beribadah. Saat berpuasa, beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaan berbuka ketika sudah waktunya. Bangun di malam hari (shalat tahajud) tetapi tidak meninggalkan tidur, dan masih banyak tindakan, ucapan, serta sumpah yang beliau tunjukkan kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya. Nabi selalu memilih yang mudah daripada yang sulit, kecuali dalam hal perbuatan dosa. Kehidupan nabi mencerminkan sifat tengah, baik dari segi ibadah maupun muamalah.

2. Kompetibel dengan fitrah manusia

Kesesuaian dengan fitrah manusia adalah salah satu karakteristik moderasi. Fitrah, atau potensi yang dimiliki manusia sejak lahir, dapat disebut sebagai insting. Sejak manusia masih dalam kandungan, fitrah atau kepribadian yang tertanam dalam diri merupakan kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang memiliki kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar (Fitrah), mereka secara otomatis memiliki potensi menjalankan moderasi dalam agama, karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum agama adalah untuk menegakkan moderasi dan keadilan. Di sinilah terdapat kaitan antara kemungkinan yang sudah ada pada semua manusia dan kemudahan menerima konsep moderasi dalam agama (Islam).

3. Terhindar dari pertentangan

Konsep moderasi dalam Islam merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah beragama manusia. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk menentangnya, apalagi untuk mempertentangkan dengan konsep yang terkait keberagamaan. Konsep moderasi dalam Islam adalah ajaran Allah yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui segala sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep moderasi Islam adalah konsep yang sangat sempurna, terhindar dari kekurangan dan aib, karena bersumber dari Syariat Islam yang juga baik dan sempurna.

4. Ajek dan konsisten

Konsep moderasi beragama tentu sulit dibantah dengan akal sehat. Sebagaimana hukum Islam yang memiliki karakter yang sama, moderasi juga merupakan konsep yang permanen dan konsisten dalam arti doktrin yang tetap relevan selamanya dan kapan saja, di mana saja.

5. Bermuatan universal dan komprehensif

Konsep moderasi Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dunia, agama, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan, tanpa kekurangan sedikit pun. Relevan di setiap era dan di mana pun, konsep ini terhindar dari kesalahan dan kekurangan. Moderat Islam juga mencakup aspek akidah, ibadah, mu'amalah, Manhaj (metodologi), ideologi, dan moralitas.

6. Bijaksana, seimbang dan bebas dari tindakan berlebihan

Sifat arif bijaksana dan seimbang dalam menjalankan aspek kehidupan menjadi ciri dari moderasi beragama. Ini mencakup keseimbangan antara dunia dan kehidupan akhirat, muamalah kepada sesama manusia di bumi, pemenuhan kebutuhan mental dan fisik, serta keseimbangan dalam aspek lainnya. Ajaran Islam menekankan kesejahteraan hidup manusia dan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani dengan cara yang sederhana, tanpa berlebihan atau sembrono.





# BAB IV

## Masyarakat Multietnik

---

### Definisi Masyarakat Multietnik

Berbicara tentang masyarakat multietnis, ada dua istilah yang layak dibahas, yaitu masyarakat dan etnisitas. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat 1990:146-147). Istilah *ethnicity* berasal dari bahasa Yunani *ethnos*, yang berarti orang, kerumunan, atau negara. Etnos sebagai suatu komunitas orang yang terbentuk secara historis dan dicirikan dengan adanya suatu budaya umum yang relatif stabil dan kesadaran terhadap kesatuan mereka sebagai komunitas yang berbeda dengan komunitas lain yang sejenis.

Williams (1989) menyatakan bahwa etnisitas memberikan label pada aspek proses pembentukan identitas yang dihasilkan oleh rencana dan program nasional, rencana yang ditujukan untuk menciptakan homogenitas dan heterogenitas melalui proses hegemoni dari kelompok transformis. Istilah etnisitas telah digunakan untuk mendeskripsikan interaksi sosial manusia, khususnya dalam kaitannya dengan kelompok masyarakat yang biasanya digambarkan sebagai “suku” dan dengan kelompok pendatang minoritas serta masyarakat setempat. Dalam hal ini, etnisitas merupakan suatu koleksi pernyataan yang jelas tentang batas, orang lain, tujuan, dan pencapaian, identitas, keturunan yang dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri (Bank, 2005:190).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sementara itu, multi diartikan sebagai banyak; lebih dari satu; lebih dari dua dan berlipat ganda. Etnik bermakna bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya; etnis.

Masyarakat multietnik diartikan sebagai entitas sosial yang terdiri dari kelompok etnis yang berbeda, dengan budaya, bahasa, dan latar belakang sejarah yang berbeda, hidup bersama dalam suatu wilayah atau negara. Studi tentang masyarakat multietnik merupakan bagian penting dalam kajian Sosiologi, Antropologi, dan ilmu sosial lainnya karena fenomena ini memiliki dampak signifikan pada hubungan antar kelompok, integrasi sosial, dan stabilitas nasional suatu bangsa.

Dalam kajian teori ini, teori-teori utama yang relevan untuk memahami masyarakat multietnik adalah teori integrasi sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat multietnik dapat mencapai stabilitas dan harmoni melalui integrasi sosial. Durkheim menggunakan istilah solidaritas sosial yang terdiri dari dua jenis, yaitu solidaritas sosial mekanik dan organik (Johnson, 1994: 181). Selain itu, Morgono menyatakan bahwa integrasi sosial terjadi ketika individu dari berbagai kelompok etnis merasa terhubung satu sama lain melalui nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan bersama (Martono, 2014: 51).

Durkheim menyebut solidaritas sosial sebagai fakta sosial yang memuat nilai, falsafah, norma, dan aturan memaksa individu dan komunitas yang berbeda untuk melaksanakannya secara bersama-sama. Menurutnya, fakta sosial terdiri dari dua jenis, yaitu material dan non-material. Fakta sosial material mencakup segala sesuatu yang berbentuk fisik atau kebendaan, sementara yang bersifat abstrak seperti nilai, falsafah, hukum, norma, dan kearifan termasuk dalam kategori fakta sosial non-material. Kedua jenis fakta sosial ini harus dirawat dan dilestarikan dalam

interaksi kehidupan sosial lintas budaya agar dapat mengurangi konflik antar kelompok etnis (Ritzer, 2012).

Teori pluralisme budaya, yang dipopulerkan oleh Horace Kallen dan lainnya, berpendapat bahwa masyarakat multietnik harus menghargai dan memelihara keberagaman budaya. Dalam konteks ini, setiap kelompok etnis memiliki hak untuk mempertahankan identitas, bahasa, dan tradisi mereka sendiri. Kallen menekankan bahwa pluralisme budaya menitikberatkan pada penghargaan terhadap perbedaan dan menghindari asimilasi paksa sebagai bentuk nilai dan prinsip demokrasi (Kallen, 1924).

Teori konflik sosial, yang dikembangkan oleh Karl Marx dan kemudian diperluas oleh teoritis seperti W.E.B. Du Bois, menyoroti konflik antar kelompok etnis akibat persaingan sumber daya dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya analisis kelas sosial dan kuasa dalam dinamika masyarakat multietnik (Du Bois, 1903).

Teori identitas sosial, yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner, menjelaskan bagaimana individu dalam masyarakat multietnik mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai anggota kelompok tertentu (identitas sosial) dan bagaimana dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka dengan kelompok lain (Tajfel & Turner, 1979).

## **Perubahan Sosial Masyarakat Multietnik**

Manusia adalah makhluk berpikir yang dinamis dengan kecenderungan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan sosial menuju arah yang lebih maju. Oleh karena itu, kehidupan manusia di dunia ini tak terlepas dari perubahan. Perubahan senantiasa hadir dalam masyarakat karena masyarakat selalu berada dalam kondisi dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi dapat berdampak pada kemajuan atau kemunduran. Unsur-unsur perubahan dalam masyarakat melibatkan nilai-nilai sosial, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, dan sebagainya.

Selain itu, dia juga memasukkan perubahan sosial dalam bidang yang luas, dan didefinisikan sebagai variasi dalam setiap aspek proses

sosial, bentuk-bentuk sosial, dan setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standard perilaku. Strauss dan Corbin dalam Budiana bahwa “matriks tingkat kehidupan manusia, yaitu; tindakan (*action*), interaksi (*interaction*), kelompok individu (*individual group*), bagian organisasi/pranata (*sub organization/sub institusional level*), organisasi (*organization*), komunitas (*community*), nasional (*national*), dan internasional (*international*)”.

Farley dalam Sztomka mengemukakan bahwa perubahan sosial tergambar pada perubahan perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu (Sztompka, 2008). Sedangkan Selo Sumardjan menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah transformasi yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok yang ada dalam masyarakat. Perubahan sosial yang direncanakan untuk mencapai kondisi tertentu dalam masyarakat berdasarkan situasi tertentu menjadi faktor kunci terjadinya perubahan sosial. Perubahan terencana dalam struktur masyarakat yang dilakukan oleh individu diharapkan menghasilkan perubahan sosial yang positif. Dalam interaksi sosial keagamaan, diharapkan perilaku individu mampu menciptakan struktur masyarakat yang egaliter, dengan kebebasan bertindak tanpa adanya tekanan dari kelompok masyarakat tertentu (Sumarjan, 2009).

Dalam konteks ini, teori perubahan sosial cocok digunakan untuk menjelaskan latar belakang sejarah pemukiman transmigrasi dan dinamika perubahan sosial keagamaan inklusif yang mengiringi masyarakat multietnik.

Teori fungsionalisme struktural, yang banyak dikembangkan oleh Talcott Parsons dalam dunia Sosiologi modern, merepresentasikan transformasi pemikiran klasik seperti Marxisme, Weberianisme, atau Durkheimisme ke dalam konteks kontemporer. Parsons, sebagai tokoh moderat, berhasil mentransformasikan gagasan-gagasan klasik tersebut dengan cara yang inovatif. Meskipun kritik terhadap teori-teori Parsonian,

seperti fungsionalisme struktural, tetap ada, namun teori tersebut masih dianggap sebagai landasan penting dalam kajian Sosiologi Modern.

Dalam kerangka teori Fungsionalisme Struktural, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai suatu sistem sosial. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat dianggap sebagai sistem sosial yang terdiri dari individu-individu dengan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut sering kali terkait dengan peradaban atau kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk tindakan atau perilaku sosial. Pentingnya pendekatan budaya setempat juga ditekankan oleh Parsons dalam mengkaji berbagai masalah sosial di masyarakat.

Peter Knapp Seraya menyatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut sendiri, yang dijadikan sebagai orientasi tindakan. Nilai-nilai ini mencakup norma dan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar mereka. Knapp juga menggambarkan bahwa norma dan nilai-nilai budaya ini disebut sebagai sosial order (Knapp, 2001). Menurut dua ciri khas tersebut, Parsons berpendapat bahwa bagian-bagian yang membentuk sistem sosial saling bergantung dan keterkaitan satu sama lain. Pendapat ini kemudian dikenal sebagai konsep “interdependensi” dalam kajian Sosiologi.

Prinsip interdependensi menyatakan bahwa tidak ada unsur sosial yang terpisah satu sama lain. Setiap unsur memberikan peran sosial sesuai dengan kualifikasinya, termasuk unsur budaya. Dalam sistem sosial, unsur budaya memegang peran penting dalam membentuk dan mengintegrasikan masyarakat melalui nilai-nilai yang dikandungnya.

Penerapan teori fungsional struktural dalam pembinaan moderasi beragama pada masyarakat multietnik di daerah transmigrasi dapat membantu mencapai tujuan sosial seperti harmoni antaragama, integrasi sosial, dan perkembangan masyarakat yang seimbang, sehingga mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ini melibatkan pemahaman dan analisis tentang bagaimana struktur sosial dan fungsi-fungsi dalam masyarakat tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh upaya mempromosikan

moderasi beragama, termasuk elemen-elemen seperti kelompok etnis yang beragam, kebutuhan akan keamanan sosial, dan harmoni antar umat beragama.

Ada beberapa langkah penerapan teori fungsional struktural dalam pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi antara lain:

1. Analisis Struktur Sosial

Analisis struktur sosial menjadi sebuah pendekatan penting dalam memahami kerangka dasar masyarakat, mengidentifikasi peran individu, menguraikan hierarki kelompok, serta menganalisis interaksi yang terjadi antar anggota masyarakat. Analisis ini digunakan untuk menggali lebih dalam bagaimana struktur sosial memengaruhi dinamika sosial, khususnya terkait dengan aspek moderasi beragama.

2. Identifikasi Fungsi Sosial Agama

Melalui identifikasi fungsi sosial agama dapat menggali dan memahami peran serta kontribusi agama dalam membentuk pola perilaku, nilai, norma, dan integrasi sosial dalam masyarakat multietnik. Analisis mendalam terhadap ajaran agama diharapkan dapat mengungkap bagaimana keyakinan keagamaan berkontribusi pada pembentukan identitas budaya dan memengaruhi dinamika sosial di tengah keragaman masyarakat.

3. Mengamati dialog antar agama

Melalui proses pengamatan dialog antar agama, yang bertujuan untuk merinci dan menganalisis interaksi komunikatif yang terjadi di antara penganut berbagai agama dalam masyarakat multietnik. Dengan fokus pada dialog antar agama, dapat memahami dinamika percakapan, pertukaran pandangan, serta upaya mencapai pemahaman bersama dan toleransi di tengah perbedaan kepercayaan dan praktik keagamaan. Pemahaman mendalam terhadap dialog antar agama diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemantapan moderasi beragama dalam konteks masyarakat yang heterogen.

4. Menggali peran kepemimpinan antaragama  
Melalui eksplorasi peran kepemimpinan antar agama, maka dapat menyelami kontribusi dan dampak pemimpin agama dalam merawat moderasi beragama di lingkungan masyarakat multietnik. Dengan fokus pada dinamika kepemimpinan antar agama, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi, nilai-nilai, serta praktek kepemimpinan yang mendorong kerja sama antar umat beragama, memperkuat toleransi, dan mempromosikan perdamaian di tengah keberagaman agama. Hasil eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peran pemimpin agama dapat membentuk landasan moderasi beragama yang kokoh dan inklusif.
5. Mendorong pembentukan organisasi komunitas  
Melalui inisiatif untuk mendorong pembentukan organisasi komunitas, yang berupaya memahami dampak dan proses yang terlibat dalam membangun struktur organisasional di masyarakat multietnik. Dengan mengeksplorasi langkah-langkah praktis, strategi pemberdayaan, dan peran organisasi komunitas, penelitian ini akan mengidentifikasi cara di mana organisasi tersebut dapat menjadi agen perubahan dalam mendukung moderasi beragama. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana pembentukan organisasi komunitas dapat menjadi wadah untuk memajukan nilai-nilai moderasi, mengatasi perbedaan, dan membangun solidaritas di antara anggota masyarakat multietnik.
6. Temukan program penyuluhan dan edukasi agama  
Dalam rangka mengeksplorasi dan mengidentifikasi program penyuluhan dan edukasi agama, dapat memahami peran dan dampaknya terhadap persepsi dan praktik moderasi beragama di tengah masyarakat multietnik. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai program yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana inisiatif penyuluhan dan edukasi dapat menjadi instrumen efektif dalam merespons tantangan moderasi beragama. Selain itu, penelitian ini akan membahas bagaimana



program-program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keragaman masyarakat multietnik, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pendidikan agama dalam mencapai tujuan moderasi.

#### 7. Mendorong partisipasi masyarakat

Dalam usaha merangsang partisipasi masyarakat, bertujuan untuk mengeksplorasi strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan tindakan praktis guna memperkuat peran serta warga dalam menciptakan lingkungan multietnik yang harmonis dan penuh toleransi. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan dan menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi aktif dalam upaya menjaga moderasi beragama.

Penerapan teori fungsional struktural dalam konteks pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam konteks ini, pemimpin agama dan masyarakat perlu memaksimalkan fungsi berbagai lembaga keagamaan yang dimiliki masing-masing agama yang dapat mempromosikan kerjasama lintas agama secara inklusif dan damai.

### **Masalah-masalah sosial dalam Masyarakat Multietnik**

Masalah-masalah sosial dalam masyarakat multietnik menjadi fokus kajian penting dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis. Dalam hal ini, akan dianalisis dengan cermat sejumlah masalah sosial yang muncul dalam konteks multietnik, serta upaya-upaya untuk mengidentifikasi solusi yang dapat mendukung terciptanya harmoni, integrasi sosial, dan moderasi beragama, yang akan diuraikan dibawah ini:

## 1. Menguatnya Primordialisme dan Etnosentrisme

Ikatan primordial, pada dasarnya, bersumber dari identitas dasar yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok etnis. Identitas tersebut melibatkan unsur-unsur seperti tubuh, nama, bahasa, agama atau kepercayaan, sejarah, dan asal-usul (Issac, 1993: 48-58). Identitas dasar ini menjadi titik rujukan utama bagi para anggota kelompok etnik dalam menjalani interaksi sosial mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa identitas dasar berfungsi sebagai panduan fundamental yang umum dan mendalam, memberikan kerangka dasar bagi eksistensi dan perwujudan suatu kelompok etnik.

Identitas dasar diperoleh secara askriptif dan sulit untuk dipertanyakan, munculnya identitas dasar terjadi dalam interaksi sosial antar kelompok etnik. Saat terlibat dalam interaksi tersebut, para pelaku dari berbagai kelompok etnik menyadari adanya perbedaan di antara mereka. Identitas dasar kemudian menjadi pembeda antara berbagai kelompok etnik yang sedang berinteraksi. Identitas dasar merupakan sumber terbentuknya ikatan primordial, suatu ikatan yang lahir dari hubungan keluarga atau hubungan darah (garis keturunan), hubungan ras, lingkungan kepercayaan atau keagamaan, serta bahasa atau dialek tertentu. Persamaan dalam hubungan darah, dialek, ras, kebiasaan, dan lainnya menciptakan ikatan emosional (Geertz, 1992: 3) yang kadang-kadang dapat menjadi destruktif. Ikatan-ikatan tersebut, menurut Geertz, dapat dianggap sebagai warisan dari sifat sosial yang telah ada, suatu kelangsungan yang berkesinambungan, sebagian besar merupakan ikatan keluarga, namun juga merupakan warisan yang berasal dari kelahiran di tengah-tengah masyarakat beragama tertentu, yang berbicara dalam dialek bahasa tertentu, dan mengikuti praktik-praktik sosial tertentu (Isaacs, 1993: 45).

Dalam kehidupan sehari-hari, identitas dasar suatu kelompok etnik seringkali mengalami manipulasi (Cohen, 1971). Identitas dasar dapat dinon-aktifkan, diaktifkan, atau dipersempit karena sifatnya yang tidak seperti batu, melainkan cair, memungkinkannya

untuk mengalir dan berkembang sebagai upaya penyesuaian dalam kehidupan. Namun, terkadang aliran identitas dasar dapat menerjang dengan kuat seperti banjir yang membobol bendungan-bendungan, merusak segala sesuatu yang ada di jalannya. Dalam situasi-situasi tertentu, identitas dasar yang mewujudkan keberadaannya dalam bentuk ikatan-ikatan primordial dapat melahirkan kohesi emosional yang sangat kuat atau bahkan menjadi etnosentrisme yang berlebihan, menjadi sumber malapetaka.

Di sisi lain, kohesi emosional yang timbul dari ikatan primordial dapat menciptakan rasa aman, kehangatan, atau kepercayaan di antara anggota kelompok etnik tersebut. Kepercayaan yang tumbuh di antara mereka sendiri bisa menjadi dasar bagi kegiatan bisnis. Banyak transaksi bisnis dilakukan tanpa perlu didukung oleh surat-surat perjanjian resmi, kontrak hukum, atau bahkan secarik kertas. Mereka menjalankan bisnisnya berdasarkan rasa saling percaya, karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama, berbicara dalam bahasa atau dialek yang sama, memiliki nama keluarga yang identik, atau memiliki keturunan yang sama. Kesamaan identitas dasar, dengan demikian, mendorong timbulnya saling kepercayaan, setidaknya pada pertemuan pertama mereka di mana dianggap memiliki perilaku yang serupa karena berasal dari lingkungan yang sama.

Kesadaran etnik, yang bersumber dari identitas dasar suatu kelompok etnik, merupakan pengalaman yang umum dialami oleh setiap individu. Identitas dasar ini adalah asal mula dari terbentuknya ikatan primordial. Ikatan ini dapat diekspresikan dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Di Indonesia, dimulainya program desentralisasi yang cukup radikal menimbulkan sejumlah permasalahan kompleks, terutama berkaitan dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta potensi memperbesar jurang ketidaksetaraan jika kabupaten-kabupaten yang lebih makmur

mengalami perkembangan yang pesat, meninggalkan kabupaten-kabupaten lainnya.

## 2. Ketidakadilan Sosial

Di negara yang sangat besar dan terdiri dari beragam etnis, selalu terdapat potensi bahaya di mana konflik ketenagakerjaan, pertanahan, atau konflik atas sumber daya alam dapat timbul sebagai konflik antar etnis dan konflik antar agama. Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh, terbuka peluang bagi munculnya format politik baru yang memungkinkan timbulnya kembali berbagai pertikaian yang pernah terjadi di masa lampau. Munculnya konflik-konflik ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk, seperti penurunan kepercayaan kepada lembaga-lembaga politik yang dapat membahayakan keberlanjutan masa depan reformasi ekonomi Indonesia.

Ketidakadilan sosial, budaya, dan ekonomi menciptakan kondisi yang subur untuk tumbuhnya konflik. Terbuka kemungkinan bahwa berbagai kepentingan dari luar sengaja meningkatkan ketegangan. Namun, ketidakadilan itu sendiri menjadi pemicu munculnya konflik. Agama atau etnik seringkali dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan konflik tersebut. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka semakin meningkat, bukan hanya dalam ranah politik, tetapi juga hak-hak ekonomi seperti hak atas pangan, kesehatan, dan pekerjaan. Ketika masyarakat menekankan identitas kedaerahan dan etnis, mereka tidak hanya menuntut otonomi atau kebebasan politik yang lebih besar, melainkan juga menyuarakan bahwa sebagian dari hak-hak sosial dan ekonomi dasar mereka belum terpenuhi.

Keberagaman di Indonesia harus diakui sebagai kebenaran obyektif yang nyata dalam masyarakat. Perbedaan tidak perlu dieksploitasi untuk memenangkan kepentingan. Tekanan berpotensi menumpuk ketidakpuasan dari kelompok yang tertekan karena

ekspresi dan identitas, baik agama maupun etnik, tidak dapat diungkapkan.

Terdapat beberapa solusi tentang masalah-masalah sosial yang kerap muncul dalam masyarakat multietnik, yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Membangun Hubungan Kekuatan

Dalam masyarakat multietnik, pola dan model pergaulan yang bersifat etnosentrik dapat memiliki dampak kontraproduktif. Usaha bisnis yang berkembang pesat dan dikuasai oleh satu kelompok etnis serupa dengan menyimpan bom waktu yang pada suatu saat dapat menyebabkan ledakan sosial. Sosialisasi kesadaran multietnik dapat dilaksanakan melalui konsep proses sosial, yaitu cara berhubungan antarindividu atau antarkelompok, atau individu dengan kelompok, yang menghasilkan bentuk hubungan tertentu. Dari hubungan ini diharapkan mereka semakin saling mengenal, menjadi lebih akrab, lebih mudah bergaul, lebih percaya pada pihak lain, dan akhirnya dapat bekerja sama dan bersinergi. Semua ini dapat dipahami sebagai bagian dari peradaban manusia.

Proses sosialisasi dimulai dari interaksi sosial dengan perilaku imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati (Pidarta, 1997:147). Interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat: kontak sosial dan komunikasi. Setiap masyarakat saling berinteraksi dan beradaptasi pada lingkungan secara menyeluruh, mencakup lembaga sosiopolitik masyarakat dan elemen organik lainnya. Dari hasil interaksi sosial diharapkan tidak ada strata sosial antaretnik, melainkan terjadi pembentukan peradaban atau akulturasi antaretnik.

Peradaban adalah jaringan kebudayaan, yang biasanya terkait dengan wilayah tertentu bagi setiap budaya (Cohen, 1970:64). Pembentukan peradaban dapat dicapai melalui saling ketergantungan antaretnik. Ketergantungan ini dapat termanifestasikan melalui program-program atau kegiatan, di mana hubungan kekuatan semakin erat terjalin. Jenis kegiatan tersebut mencakup perdagangan, kesenian, dan pendidikan.

Hubungan kekuatan (HK) dalam bentuk saling ketergantungan dapat meningkatkan adaptasi antaretnik dan potensial menciptakan peradaban baru. Peradaban diartikan sebagai kebudayaan yang telah lebih maju (Pidarta, 1997:158). Jika kebudayaan diinterpretasikan sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh anggota masyarakat, maka 'kerjasama' menjadi suatu bentuk kebudayaan. Sebagai contoh, kerjasama antara etnik Cina dan Jawa dalam distribusi mobil dapat menciptakan hubungan kekuatan yang solid.

## 2. Membangun Budaya Toleransi

Istilah budaya toleransi (culture of tolerance) tampaknya belum banyak dikenal dalam wacana sosial-politik Indonesia, karena selama masa otoriter Orde Baru, toleransi menjadi salah satu nilai yang dimobilisasikan dan diintroduksikan secara represif dalam paket ideologi uniformitas Pancasila. Dalam alam militeristik tersebut, setiap gerakan yang berbau keagamaan, kedaerahan, ataupun kesukuan yang eksklusif cenderung dianggap sebagai pembangkangan SARA, dan biasanya ditindak dengan tegas oleh aparat negara. Karena itu, toleransi lebih banyak dipahami sebagai ideologi kaum penguasa dan bukan bagian dari proses kebudayaan masyarakat bangsa.

Seiring berakhirnya masa despotisme Orde Baru, era romantis ideologi Pancasila juga berakhir. Penataran-penataran P4 di berbagai level dengan pola-pola yang beragam dihentikan, membawa dampak positif maupun negatif. Dalam konteks reformasi ini, isu-isu mengenai toleransi, identitas, dan pluralitas menjadi perhatian masyarakat dan bukan lagi menjadi tanggung jawab 'ideologis' negara. Namun, perubahan tersebut terjadi dengan sangat cepat, membuat banyak pengamat budaya Indonesia khawatir akan hilangnya rantai pemersatu bangsa (chain of national unity). Mungkin belum sepenuhnya disadari bahwa harga sosial yang harus dibayar karena hilangnya rantai pemersatu itu sangat mahal.

Beberapa pakar kebudayaan, seperti Galtung dan Soedjatmoko, menyatakan bahwa nilai toleransi bukanlah sebuah nilai yang eksis

secara independen. Kadar toleransi bersumber dari adanya nilai empati yang secara inheren ada dalam hati setiap manusia. Empati merupakan kemampuan hati nurani manusia untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain; kemampuan untuk ikut merasakan kegembiraan dan kedukaan orang lain. Semakin tinggi kadar empati seseorang, semakin tinggi juga kemampuan orang itu dalam membangun nilai toleransi, yaitu kemampuan untuk menerima dan menghargai adanya perbedaan.

Nilai toleransi merupakan salah satu aspek dalam khazanah budaya berpikir positif. Ir. Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Kabinet Indonesia Bersatu, baru-baru ini menerbitkan buku saku berjudul “Budaya Berpikir Positif” (2005). Menurut Wacik, budaya berpikir positif, yang mencakup cara berpikir manusia yang selalu melihat sisi positif, optimistik, integratif, dan realistik terhadap berbagai permasalahan hidup, sebenarnya telah ada dalam kebudayaan setiap etnik di bumi Nusantara ini. “Semakin sering kita berpikir positif, semakin banyak kita memiliki sahabat. Sekat-sekat primordialisme di antara kita akan menjadi semakin menipis. Sebaliknya, semakin sering kita berpikir negatif, semakin banyak pula kita memiliki musuh. Dengan demikian, kehidupan bangsa kita pun akan menjadi semakin kerdil,” ungkap Jero Wacik dalam sebuah pertemuan di Jakarta (18/2).

Sebelum diideologikan, nilai toleransi, kasih, dan persahabatan yang tulus antar kelompok komunitas dengan latar belakang SARA yang berbeda sebetulnya sudah menjadi bagian dari budaya. Membahas kebudayaan suku-suku bangsa dalam tulisan singkat seperti ini tentu tidak mungkin, karena kebudayaan itu sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, tulisan ini hanya akan membahas sebuah contoh kasus di Flores sebagai representasi dari ribuan fenomena serupa yang pernah terjadi di bumi Nusantara ini.

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses membentuk individu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Sebagai kunci pemecahan masalah-masalah sosial, pendidikan memungkinkan rekonstruksi masyarakat. Rekonstruksi ini mencakup reformasi budaya, di mana melalui pendidikan, reformasi budi pekerti, reformasi kebudayaan (keindonesiaan), dan reformasi nasionalisme (NKRI) dapat diimplementasikan. Tolstoy mengemukakan pandangan bahwa tujuan tertinggi pendidikan terletak di luar ranah pendidikan, yakni pada kebudayaan.

Tolstoy meyakini bahwa nilai-nilai masyarakat yang “beradab” akan tetap bertahan, meski dihadapkan pada berbagai konflik atau klaim yang saling bertentangan.

Pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat adalah suatu proses yang mampu mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam interaksi sosial manusia. Konsep sosialisasi pendidikan dapat diterapkan sebagai cara berhubungan antarindividu, antarkelompok, atau individu dengan kelompok yang menghasilkan bentuk hubungan tertentu. Sekolah dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan pembauran multietnik. Guru perlu membina siswa agar memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab dengan sesama teman dari berbagai latar belakang etnik.

Proses pembelajaran di kelas multietnik memiliki potensi untuk menghasilkan peradaban baru sesuai dengan harapan reformasi. Untuk mencapai hal ini, dapat diterapkan teori, model, dan strategi pengajaran multietnik sebagai sarana menjalankan reformasi pendidikan dan kebudayaan. Implementasi strategi pengajaran multietnik di kelas seharusnya bertujuan untuk membentuk peradaban bangsa Indonesia yang mulia.

Namun, perlu dicatat bahwa sampai saat ini, pengajaran multietnik belum dilegalisasikan oleh pemerintah. Pengajaran bahasa daerah dilaksanakan dalam format restorasi (mempertahankan



bahasa/budaya dari kepunahan) dan bukan dalam format pluralisme (mengakui perbedaan bahasa). Dengan format tersebut, pengajaran bahasa daerah cenderung bersifat otoriter dan mengabaikan realitas keragaman etnik di dalam kelas (Yapi Taum, 2006).

# BAB V

## Aspek-Aspek Transmigrasi

---

### Dimensi Historis Transmigrasi

Pada tanggal 12 Desember 1950, dimulailah pelaksanaan program transmigrasi oleh Pemerintah Indonesia. Program ini merupakan kelanjutan dari program kolonisasi yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Dalam konteks nasionalis, program ini dikenal dengan nama transmigrasi dan bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa (UPTD Ketransmigrasian Lampung).

Pada waktu itu, kelompok pertama kolonisator terdiri dari 155 keluarga asal Bagelan, Karesidenan Kedu, yang dipindahkan ke Gedongtataan, Lampung. Di lokasi tersebut, para pendatang mendirikan desa pertama yang disebut Bagelen, mengikuti nama desa asal mereka. Dari sini dimulai sejarah transmigrasi yang selama satu abad (sejak tahun 1905) turut serta dalam perjuangan bangsa (Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI).

Pelaksanaan program transmigrasi merupakan langkah untuk meratakan berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, aspek mental-spiritual dan keagamaan, olahraga, kesenian, dan berbagai aspek lainnya. Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena masyarakat transmigrasi telah memberikan kontribusi dalam mengembangkan daerah-daerah baru di Indonesia.

Program transmigrasi saat ini tidak hanya fokus pada meratakan jumlah penduduk, melainkan juga menjadi bagian yang integral dari pembangunan daerah. Implementasi nya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi khusus dari daerah tujuan. Pemerintah pusat menekankan perlunya transmigrasi yang lebih menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam hal ini, peningkatan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam kebijakan strategis untuk pengembangan daerah transmigrasi. Kerjasama yang baik juga diperlukan antara pemerintah dan masyarakat setempat, termasuk tokoh adat dan agama, terutama terkait dengan penyediaan dan status kepemilikan lahan.

Seiring dengan pengembangan berbagai kawasan dan lingkungan strategis di Indonesia, pelaksanaan program transmigrasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Melalui serangkaian kebijakan terencana dan program pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Langkah-langkah strategis ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, serta pelatihan keterampilan untuk mendukung integrasi transmigran dalam kehidupan ekonomi dan sosial lokal. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi transmigran secara langsung tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas pada kesejahteraan masyarakat di sekitar mereka.
2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah  
Melalui program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan dan pemerataan, pemerintah berupaya mencapai tujuan strategis untuk mengangkat taraf hidup masyarakat di seluruh daerah. Langkah-langkah ini melibatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif, pengembangan sektor ekonomi lokal, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan akses

terhadap layanan publik. Dengan demikian, upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan terbelakang, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap komunitas di seluruh negara merasakan manfaat positif dari perkembangan dan kemajuan pembangunan.

### 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung harmoni sosial dan integrasi nasional. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan karakter, promosi dialog antarbudaya, serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan budaya yang memupuk rasa solidaritas di antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kerukunan antarwarga negara tetapi juga untuk membangun fondasi kuat persatuan dan kesatuan sebagai landasan yang kokoh bagi kemajuan dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

## **Kebijakan dalam Transmigrasi**

Saat ini, transmigrasi tidak lagi dianggap sebagai program pemindahan penduduk Indonesia, melainkan sebagai upaya untuk pengembangan wilayah. Kebijakan program transmigrasi mengalami perubahan dengan metode yang tidak lagi bersifat sentralistik dan top-down dari Kementerian, tetapi lebih berbasis pada kerjasama antara daerah pengirim transmigran dan daerah tujuan transmigrasi.

Aturan teknis pelaksanaannya semakin diperbarui dengan memberikan kesempatan kepada penduduk daerah setempat untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dengan proporsi 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA). Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian mewajibkan adanya perubahan dan penyesuaian dalam implementasinya, yang berbunyi:

“Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi masyarakat. Melalui proses integrasi dan akulturasi tersebut dapat mempercepat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang pada gilirannya dapat menjadi kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, serta memantapkan ketahanan Nasional”.

Secara substansial, isi Undang-Undang Ketransmigrasian mencerminkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan aspek perekonomian. Oleh karena itu, selain fokus pada pembinaan ekonomi rakyat, penting juga dilakukan pembinaan dalam bidang agama untuk mencapai harmoni antara warga beragama dan etnis yang berbeda.

Pembinaan terhadap masyarakat multietnik memerlukan pendekatan yang rutin dan berkelanjutan, mengingat bahwa masyarakat transmigran berasal dari berbagai latar belakang daerah yang berbeda, termasuk etos kerja dan pengalaman keagamaan yang beragam. Namun, tantangan muncul dalam mencapai daerah transmigrasi karena kendala medan dan kondisi cuaca, terutama pada musim hujan.

Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok yang dalam konteks ini, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu ditingkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, termasuk masyarakat sekitar permukiman transmigrasi. Kedua, penting untuk membangun kemandirian baik pada level transmigran maupun masyarakat di sekitar permukiman transmigrasi. Dan yang ketiga, tujuan yang tak kalah pentingnya adalah mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, dengan harapan ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Inti dari ketiga sasaran tersebut adalah upaya membangun komunitas masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah serta pengarahan perpindahan penduduk. Dengan kata lain,

pembangunan transmigrasi merupakan suatu proses yang terus-menerus melibatkan pemerintah daerah setidaknya, dengan tujuan mewujudkan komunitas yang tumbuh dan berkembang secara dinamis, produktif, maju, dan mandiri, dalam suasana harmonis dan sejahtera.

## **Tujuan Program Transmigrasi**

Transmigrasi masyarakat multietnik merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang masih jarang penduduknya, dengan tujuan untuk mengurangi tekanan penduduk pada daerah yang padat penduduk dan membuka lahan baru untuk pertanian dan perkebunan. Program ini melibatkan penduduk dari berbagai suku dan etnis yang berbeda, sehingga terjadi percampuran antar suku dan etnis di daerah transmigrasi

Untuk mendukung program transmigrasi, penting untuk mengokohkan dasar-dasar kerukunan antarumat beragama, yang didasari oleh nilai-nilai normatif agama dan budaya luhur bangsa, guna mencapai keharmonisan sosial dan persatuan nasional. Oleh karena itu, program moderasi beragama menjadi sangat diperlukan agar masyarakat multietnik transmigrasi terhindar dari potensi konflik sosial yang berkaitan dengan agama dan etnis.

Program transmigrasi memiliki tujuan sesuai dengan undang-undang pokok yang mengatur mengenai transmigrasi, yakni mencakup berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan, seperti peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat yang terlibat. Program ini juga dirancang untuk mengatasi disparitas pembangunan antarwilayah, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.

Tujuan program transmigrasi antara lain adalah:

1. Bagian dari pembangunan nasional.  
Pembangunan nasional melibatkan sejumlah aspek penting, dan salah satu elemen krusial yang menjadi bagian integral dari proses ini

adalah program transmigrasi. Program transmigrasi diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan menyeimbangkan distribusi penduduk dan sumber daya di berbagai wilayah. Melalui transmigrasi, pemerintah berupaya mengatasi disparitas pembangunan antar daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Dengan melibatkan sektor-sektor kunci seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, program transmigrasi menjadi bagian strategis dari upaya menyeluruh dalam membangun dan memajukan Indonesia sebagai bangsa.

2. Penyelenggaraan program transmigrasi memiliki arah yang terfokus pada kontribusinya terhadap keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam sektor pertanian. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup mereka, serta mengembangkan daerah-daerah yang terlibat. Dalam konteks yang lebih luas, program transmigrasi juga ditujukan untuk mencapai pemerataan penyebaran penduduk, distribusi pembangunan yang merata di seluruh wilayah negara, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta memperkuat kesatuan dan persatuan nasional. Secara keseluruhan, program ini juga diarahkan untuk mendukung pertahanan nasional dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia.
3. Penduduk yang menjalani transmigrasi umumnya berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lemah, terutama petani yang mungkin memiliki atau bahkan tidak memiliki lahan di daerah yang padat penduduk. Proses transmigrasi ini bertujuan untuk memberikan peluang dan akses kepada mereka yang mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi serta kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di wilayah baru yang lebih berpotensi.

Dengan demikian, transmigrasi menjadi suatu kebijakan dengan tujuan utama untuk mencapai sejumlah aspirasi nasional. Tujuan-tujuan tersebut melibatkan upaya meratakan penyebaran penduduk,

memberikan kesempatan kerja, mempercepat pembangunan di berbagai daerah, pemerataan sumber daya alam dan manusia, serta peningkatan taraf hidup bagi para transmigran. Melalui program ini, Pemerintah berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, menciptakan lapangan kerja, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di wilayah-wilayah baru. Selain itu, transmigrasi juga diorientasikan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, menghasilkan pertahanan dan keamanan nasional yang lebih kokoh. Dengan demikian, transmigrasi dapat dianggap sebagai suatu strategi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan nasional.





# BAB VI

## Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah

---

### **Peran Transmigrasi dalam Pengembangan Wilayah**

Program transmigrasi telah memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan wilayah, khususnya di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dengan pelaksanaannya yang telah berlangsung, program ini berhasil mengembangkan lebih dari 3.000 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan beragam infrastruktur, di mana 945 di antaranya telah berkembang menjadi desa baru. Saat ini, desa-desa baru tersebut menjadi tempat tinggal bagi sekitar 12 juta jiwa dan telah menjadi pendorong pertumbuhan kecamatan dan kabupaten baru. Data dari bekas UPT telah berperan dalam mendorong perkembangan daerah dan membantu pembentukan 240 kecamatan dan 88 kabupaten yang baru. Beberapa kawasan transmigrasi, seperti Kurotidur di Bengkulu Utara, Metro di Lampung, dan Sangkala di Kalimantan Timur, bahkan telah diakui sebagai kawasan Agropolitan. Lokasi-lokasi seperti ini sering menjadi daya tarik bagi transmigran swakarsa yang membawa bekal dan keterampilan dari daerah asal mereka.

Desa-desa transmigrasi telah berhasil mengintegrasikan diri sebagai bagian integral dari wilayah hinterland yang mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Keterlibatan aktif para transmigran dalam usaha tani telah menghasilkan dampak positif, memungkinkan

pemenuhan kebutuhan akan jenis pangan tertentu di beberapa perkotaan sekitarnya. Hasil usaha tani transmigran, seperti beras, sayur-sayuran, dan ternak unggas, telah menjadi kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk perkotaan. Pemberdayaan ekonomi di desa-desa transmigrasi tidak hanya memberikan manfaat lokal tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar, membentuk sebuah sistem saling mendukung yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam upaya meningkatkan akses terhadap faktor-faktor produksi, program transmigrasi telah merancang dan membangun sarana fisik transportasi yang melibatkan pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, dan saluran drainase. Keberhasilan infrastruktur ini terletak pada kemampuannya membuka isolasi wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan Bank Dunia (1986), program transmigrasi juga turut berkontribusi signifikan pada perluasan jaringan jalan di beberapa provinsi di Indonesia. Sebanyak 20% dari kontribusi ini terfokus pada kepulauan di luar Jawa, Madura, dan Bali, sementara mencapai bahkan 50% di empat provinsi, yakni Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pembangunan jaringan jalan ini terutama difokuskan pada pengembangan akses menuju permukiman transmigrasi, menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan dampak positif pada mobilitas dan konektivitas wilayah tersebut.

Dalam konteks sektor pendidikan, program transmigrasi telah berhasil mendirikan ribuan sekolah dasar yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik gedung, tetapi juga dilengkapi dengan peralatan dan penempatan tenaga pengajar. Upaya ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi para transmigran dan komunitas lokal di wilayah tujuan transmigrasi. Pada bidang kesehatan, transmigrasi juga berperan aktif dengan membangun ribuan unit balai pengobatan yang dilengkapi dengan penempatan tenaga medis serta

distribusi obat-obatan selama masih dalam masa pembinaan. Fasilitas sosial ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh penduduk, memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Melalui pendekatan holistik ini, program transmigrasi berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek pendidikan maupun kesehatan, membangun fondasi kuat untuk peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di wilayah transmigrasi.

### **Stadia-Stadia Pembangunan Transmigrasi**

Dilihat dari karakteristik dan mekanisme operasionalnya, transmigrasi adalah sebuah program pembangunan yang secara langsung terkait dengan pembentukan suatu wilayah. Hasil akhir dari program transmigrasi adalah terbentuknya suatu kawasan permukiman atau kawasan pengembangan yang diharapkan dapat berkembang, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Secara teoretis, kehadiran program transmigrasi seharusnya memberikan manfaat bagi daerah setempat, termasuk peningkatan ruang ekonomi dan penambahan penduduk atau sumber daya manusia.

Program transmigrasi merupakan kasus pengembangan wilayah baru dari demand side strategy. Stadia-stadia pengembangan wilayah melalui demand side strategy yang dihipotesiskan dalam tujuh stadia sebagai berikut:

1. Stadia Sub-Subsisten

Pada tahap awal transmigrasi, transmigran berada dalam stadia sub-subsisten selama satu tahun, di mana pemerintah aktif memberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan hidup (jadup) dan produksi. Selain mendukung aspek kehidupan ekonomi mereka, pemerintah juga terlibat dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur dasar dan pertanian. Langkah-langkah ini mencakup pengembangan jalan, pemukiman, sistem irigasi, dan fasilitas lainnya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat

daya hidup transmigran di daerah tujuan. Dengan demikian, pada tahap ini, pemerintah berupaya memberikan dukungan yang holistik bagi transmigran, baik dari segi kebutuhan dasar maupun pembangunan infrastruktur untuk memastikan adaptasi yang sukses dan keberlanjutan di wilayah baru mereka.

## 2. Stadia Subsisten

Setelah memasuki stadia subsisten dengan bermodal lahan pekarangan dan Lahan Usaha I, transmigran memasuki tahap kedua di mana diharapkan dapat memproduksi secara mandiri. Pada tahap ini, transmigran diharapkan mampu mengelola lahan mereka dengan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara subsisten. Pemerintah terlibat dalam memberikan dukungan, seperti pelatihan pertanian, penyediaan bibit unggul, dan bantuan teknis lainnya, untuk memastikan keberhasilan produksi dan adaptasi transmigran dalam mengelola lahan pertanian mereka. Melalui upaya ini, diharapkan transmigran dapat menjadi mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka sendiri, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah transmigrasi.

## 3. Stadia Marketable Surplus

Dengan peningkatan sistem produksi yang diterapkan, diharapkan transmigrasi akan mencapai stadia marketable surplus, di mana hasil usaha tani yang dihasilkan oleh transmigran melebihi kebutuhan keluarganya. Pada tahap ini, terutama setelah berhasil mengelola Lahan Usaha II, transmigran diharapkan mampu menghasilkan lebih banyak produk pertanian yang dapat dijual di pasar. Pemerintah turut berperan dengan menyediakan pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian transmigran. Dengan demikian, transmigran dapat tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri tetapi juga berpotensi berkontribusi pada pasokan produk pertanian bagi masyarakat luas, menciptakan dampak

positif pada perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan transmigran serta masyarakat sekitarnya.

#### 4. Stadia Industri Pertanian

Dengan mencapai surplus hasil pertanian pada tahap ketiga, diperlukan pengembangan industri pengolahan, terutama untuk memenuhi permintaan atas barang-barang olahan utama. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian, sehingga transmigran tidak perlu menjual hasil pertanian mereka di kota yang jauh. Melalui pengolahan produk pertanian secara lokal, transmigran dapat meningkatkan nilai tambah pada hasil pertanian mereka dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur untuk memfasilitasi pengembangan industri pengolahan di tingkat lokal, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah transmigrasi.

#### 5. Stadia Industri Non-Pertanian

Peningkatan pendapatan transmigran yang terjadi pada tahap keempat diharapkan akan menciptakan efek domino yang positif dengan meningkatkan konsumsi produk-produk pertanian. Dengan meningkatnya daya beli transmigran, terjadi peningkatan permintaan terhadap produk pertanian lokal. Hal ini diantisipasi akan mendorong pertumbuhan industri-industri non-pertanian skala kecil di wilayah transmigrasi. Peningkatan konsumsi produk pertanian lokal tidak hanya memberikan dampak positif pada perekonomian transmigran tetapi juga pada keberlanjutan dan keberagaman industri di tingkat lokal. Pemerintah dapat berperan dengan menyediakan dukungan kebijakan, pelatihan keterampilan, dan fasilitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri non-pertanian, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran.

6. Stadia Industrialisasi Perdesaan atau Urbanisasi Kota Kecil/Menengah  
Pada tahap ini, peningkatan pendapatan transmigran diharapkan dapat menciptakan dorongan kuat terhadap permintaan terhadap barang-barang mewah, dan efek domino ini diperkirakan akan memicu perkembangan industri-industri umum. Meskipun demikian, pembangunan kawasan transmigrasi umumnya masih tertahan pada stadia II (subsisten), dengan beberapa kasus yang berhasil mencapai stadia III (marketable surplus). Meski terdapat hambatan dalam mencapai tahap selanjutnya, potensi dari peningkatan pendapatan dan konsumsi oleh transmigran diharapkan dapat memberikan dorongan ekonomi yang lebih luas, meningkatkan aktivitas industri umum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah transmigrasi secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan terus mendorong inisiatif dan kebijakan yang mendukung transisi menuju tahap-pertahapan pembangunan yang lebih maju di kawasan transmigrasi.

Terdapat juga situasi di mana kota kecil tumbuh di beberapa kawasan transmigrasi langsung dari stadia III tanpa melalui tahapan industrialisasi (stadia IV, V, dan VI). Ketidakefektifan dan keragaman pencapaian stadia pengembangan wilayah transmigrasi dapat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan tujuan program transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi (menghambat/mendorong) stadia-stadia tersebut di kawasan transmigrasi agar program transmigrasi dapat diarahkan dan diandalkan sebagai program unggulan dalam pembangunan daerah (Rustiadi dkk, 2009).

### **Kawasan Transmigrasi sebagai Wilayah Fungsional**

Ditjen PSKT (2003) memberikan definisi kawasan transmigrasi sebagai hamparan lahan dalam kawasan budidaya yang melibatkan Pemukiman Transmigrasi yang Ada (PTA), Pemukiman Transmigrasi yang Sudah menjadi Desa (PTD), Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB), Pemukiman

Desa Setempat (PDS), dan Potensi Transmigrasi Cadangan (PTC). Kawasan ini memiliki potensi untuk pengembangan komoditas unggulan dengan skala ekonomi yang diintegrasikan dalam satu jaringan transportasi. Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan Pusat Pertumbuhan Ekonomi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung ekonomi, sosial, dan budaya (Ditjen PSKT, 2003).

Secara lebih sederhana, kawasan transmigrasi didefinisikan sebagai area yang sudah terbangun, di dalamnya ditempati oleh sekelompok warga atau masyarakat, baik transmigran maupun masyarakat setempat.

Dalam UU No. 29 Tahun 2009, kawasan transmigrasi diartikan sebagai area budidaya yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan usaha bagi masyarakat dalam kerangka sistem pengembangan. Penjelasan umum Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan merujuk pada suatu konsep pembangunan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya, membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Visi pembangunan transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Pasal 12), adalah untuk mewujudkan kawasan transmigrasi. Dalam konteks operasional, “Kawasan Transmigrasi” mencakup suatu area pembangunan yang terletak dalam batas administrasi wilayah yang memiliki potensi untuk dijadikan unit kegiatan bisnis dengan skala ekonomi yang mendukung transmigrasi. Dasar konsep kawasan dalam pembangunan transmigrasi merujuk pada teori-teori yang berasal dari bidang Pengembangan Wilayah. Dalam teori pengembangan wilayah, wilayah dianggap sebagai struktur yang terbentuk oleh satuan wilayah ekonomi yang didasarkan pada distribusi simpul jasa dan barang.

Konsep dan strategi pembangunan transmigrasi pada dasarnya mengadopsi konsep pembangunan dengan pendekatan variabel kewilayahan. Dalam kerangka ini, struktur pengembangan wilayah dibangun berdasarkan satuan wilayah ekonomi yang didasarkan pada distribusi simpul barang dan jasa. Menurut Hadjisarosa (1988), konsep



pembangunan transmigrasi menghasilkan output dengan hirarki-hirarki mulai dari Satuan Permukiman (SP) sebagai hirarki terkecil hingga hanya dapat terdeteksi melalui penerapan teori Simpul Jasa Distribusi.

Dalam konsep pembangunan transmigrasi, unit produksi berasal dari berbagai Satuan Permukiman (SP) yang kemudian berkumpul pada Satuan Kawasan Permukiman (SKP) atau Wilayah Pengembangan Parsial (WPP). SKP dan WPP berperan sebagai simpul jasa distribusi perdagangan ke luar kawasan. Sebaliknya, SKP dan WPP juga berfungsi sebagai simpul jasa distribusi perdagangan untuk aliran barang dari luar kawasan yang kemudian didistribusikan ke hirarki-hirarki di bawahnya.

# BAB VII

## Analisis Moderasi Beragama pada Masyarakat Multietnik dan Transmigrasi

---

Pada analisis mengenai moderasi beragama di tengah masyarakat multietnik dan transmigrasi. Terdapat tiga jenis analisis utama yang akan dibahas, yaitu analisis perkembangan masyarakat multietnik transmigrasi dalam perspektif perubahan sosial keagamaan inklusif, analisis dinamika pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi, dan analisis terbentuknya pola pembinaan moderasi beragama pada masyarakat multietnik transmigrasi.

Semua analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai peran moderasi beragama dalam dinamika sosial masyarakat yang heterogen dan memiliki latar belakang transmigrasi. Ketiga analisis tersebut akan diuraikan dibawah ini:

1. Analisis Perkembangan Masyarakat Multietnik Transmigrasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial Keagamaan Inklusif  
Sejarah perkembangan masyarakat wilayah transmigrasi yang multietnik menunjukkan adanya dinamika perubahan sosial yang menarik. Salah satu aspek menarik adalah terkait dengan pembentukan ikatan emosional sebagai ungkapan solidaritas hidup bersama di wilayah yang baru. Penting untuk dicatat bahwa rasa senasib seperjuangan ini tidak menjadi ancaman bagi suku asli

Simpang Raya, yang merupakan etnis Saluan. Sebaliknya, dinamika ini justru membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi dan saling belajar mengenali wilayah tempat mereka tinggal.

Ikatan emosional yang terbentuk di wilayah transmigrasi ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan rasa solidaritas sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Durkheim. Menurut Durkheim, kesadaran masyarakat dapat tumbuh melalui adanya solidaritas kelompok (Chinmayee Mishra and Navaneeta Rath, 2020).

Bagi Durkheim, solidaritas mekanis hadir dalam masyarakat tradisional di mana terdapat kesamaan antar individu, sementara solidaritas organik terlihat dalam masyarakat modern yang memiliki individu dengan perbedaan dan tujuan yang berbeda. Kesadaran kolektif mengatur solidaritas mekanis dalam masyarakat tradisional, sementara solidaritas organik muncul dari pembagian kerja dan ketergantungan saling dalam masyarakat modern (Ritzer and Stepnisky, 2018).

Pada masyarakat yang terus berkembang seiring dengan modernisasi. Kesadaran kolektif, yang sebelumnya sangat dominan dalam masyarakat tradisional, kini telah mengalami perkembangan melalui berbagai pembagian kerja yang semakin bervariasi. Pertumbuhan beberapa institusi sosial, pemerintahan, dan industri turut serta dalam mengubah dinamika masyarakat menjadi lebih dinamis. Meskipun sibuk dengan pekerjaan profesional, mereka tetap memainkan peran masing-masing dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan tersebut juga mencakup konteks keagamaan, di mana lembaga pendidikan turut berperan sebagai sarana pergeseran masyarakat. Awalnya, moderasi beragama terjadi di ruang-ruang sosial informal seperti tempat ibadah dan majlis-majlis keagamaan, dan kemudian bergerak serta terintegrasi dengan sistem pembelajaran di sekolah-sekolah. Pendidikan agama di sekolah menekankan proses pengajaran yang moderat.

Peran sekolah dalam mengarahkan perubahan sosial di masyarakat multietnik transmigrasi, terutama dalam konteks kehidupan sosial keagamaan, semakin menjadi sorotan. Para guru sering kali harus menyesuaikan dan memperdalam pemahaman tentang moderasi agama. Sesuai instruksi Kementerian Agama, semua guru agama diharapkan menjadi agen moderasi beragama. Tidak hanya berperan di sekolah, mereka juga diharapkan menjadi sumber inspirasi dan teladan dalam pemahaman keagamaan yang moderat. Bahkan, Kementerian Agama telah meluncurkan panduan moderasi beragama untuk semua sekolah. Peningkatan terbaru adalah penegasan identitas pelajar di semua sekolah sebagai pelajar Pancasila dan Pelajar Rahmatan Lil Alamin Top of Form (Direktorat KSKK Madrasah, 2022).

Selain pertumbuhan lembaga pendidikan, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam konteks masyarakat yang heterogen semakin memperkuat solidaritas di antara warganya. Berbagai forum dialog telah diadakan di berbagai tempat. Peran para tokoh agama dalam forum ini tidak hanya sebagai pengawas, melainkan juga sebagai partisipan aktif dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kelompok lintas agama.

Meskipun institusi-institusi pendukung keberagaman yang inklusif terus berkembang, solidaritas dalam perkembangan masyarakat modern juga bukan hanya sebagai tanggapan terhadap keragaman itu sendiri, melainkan juga melebur dalam dinamika kontemporer. Bahkan, ikatan sosial tidak hanya terbentuk karena perbedaan, tetapi juga karena kebutuhan bersama dalam mengatasi berbagai tantangan baru. Contohnya, saat masyarakat dihadapkan pada situasi darurat seperti bencana alam, pandemi Covid-19, dan kejadian lainnya, warga merasakan dampak yang serupa dan, oleh karena itu, bekerjasama dalam penyelesaian masalah yang menjadi kebutuhan bersama.

## 2. Analisis Dinamika Moderasi Beragama Di Masyarakat Multietnik Transmigrasi

Dinamika masyarakat multietnik di daerah transmigrasi bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti sejarah transmigrasi, keberagaman budaya etnis, interaksi sosial, dialog antar agama, dan dukungan pemerintah. Program transmigrasi telah berjalan selama beberapa dekade dan melibatkan kelompok etnis yang beragam, termasuk Jawa, Sunda, Bali, serta kelompok etnis baru seperti Bugis dan Gorontalo. Keberagaman ini menjadi kekuatan, namun juga memiliki potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Masyarakat memiliki peran aktif dalam membangun hubungan positif antaragama, menghormati perbedaan budaya, dan bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan lingkungan masyarakat multietnik yang inklusif. Pemerintah juga dapat berperan penting dalam membina moderasi beragama dengan menciptakan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang perbedaan agama dan etnis.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, forum keagamaan, dan kebudayaan dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan damai di daerah transmigrasi. Beberapa riset tentang komunikasi sosial lintas etnis di masyarakat transmigran juga memberikan gambaran yang baik. Penelitian Romli, misalnya, menggambarkan dinamika hubungan komunikasi dan interaksi antara Muslim Jawa dan Muslim Lampung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, politik, dan sosial. Komunikasi yang terjalin antara kedua etnis ini dapat dipengaruhi oleh kerja sama dan kompetisi, namun persaingan bersifat psikologis dan tidak menimbulkan konflik. Kerja sama dilatarbelakangi oleh politik, ekonomi, dan agama, memungkinkan mereka untuk mendobrak batasan suku yang berbeda. Kelompok etnis Jawa Islam dan

etnis Islam Lampung di kawasan transmigrasi Lampung Selatan mampu mengelola perbedaan budaya dengan bijak sehingga dapat berkomunikasi secara harmonis.

Interaksi sosial yang semakin kompleks dalam seluruh aspek kehidupan menunjukkan dinamika yang juga kompleks. Batasan antar kelompok seringkali tidak menjadi fokus perhatian ketika mereka memiliki kepentingan yang sama, seperti dalam soal pilihan politik, ekonomi, dan hal-hal lainnya. Ketegangan dalam kompetisi terkadang muncul, namun tidak sampai menimbulkan konflik berkepanjangan. Hal ini disebabkan bukan oleh ketegangan perbedaan horizontal, melainkan hanya dampak psikologis tertentu dan pada momentum tertentu.

Studi mengenai dinamika kehidupan beragama pada masyarakat multietnik transmigran juga menampilkan potret yang tidak jauh berbeda. Hasan dan Kohar melihat adanya proses integrasi budaya asal dan budaya pendatang sebagai proses yang selalu dinamis dan adaptif. Studi lain bahkan menunjukkan bahwa ladang ekonomi menjadi media interaksi budaya, seperti yang terjadi pada masyarakat perkebunan di Bengkulu. Masyarakat transmigran diberikan lahan untuk menggarap perkebunan, dan mereka saling bekerjasama dalam aspek kehidupan ekonomi tanpa mempertimbangkan keragaman latar belakang budaya dan asal usul kedaerahan. Bahkan, aktivitas keagamaan juga berjalan secara intensif, meskipun mereka sibuk dengan aktivitas perkebunan.

Dinamika yang terjadi semakin terawat karena adanya keterlibatan pemerintah, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat lokal dan transmigrasi. Perkembangan etnis yang semakin heterogen juga memerlukan perhatian stakeholder dalam konteks persatuan Indonesia. Hal ini berarti bahwa kesadaran sebagai warga negara merupakan nilai penting dalam heterogenitas masyarakat, dan oleh karena itu, juga merupakan nilai dasar yang menjadi karakteristik moderasi beragama.

Dengan kata lain, bibit-bibit nilai budaya yang berlangsung dalam kehidupan sosial mereka secara tidak langsung mencerminkan proses pembentukan perilaku dan sikap beragama mereka. Dinamika pembinaan moderasi beragama tidak berangkat dari ajaran eksternal, melainkan lebih kepada proses pembangkitan nilai-nilai sosial yang telah berlangsung sejak lama. Sebagaimana rekam historis pembentukan masyarakat transmigran, mereka justru berusaha membangkitkan makna budaya dengan semangat akomodatif dan berusaha beradaptasi dengan berbagai lintas budaya. Ini menandakan sikap moderasi beragama yang secara alami terjadi dalam kehidupan mereka.

Kenyataan tersebut dapat menjadi pelajaran berharga ketika menengok peristiwa konflik antar etnis Madura dan Dayak di Sampit, konflik etnis di Surakarta, konflik etnis di Lampung, dan konflik agama di Ambon. Pelajaran yang perlu diambil adalah bagaimana masyarakat transmigran dapat menghargai dan turut berpartisipasi secara adaptif dengan suku asli. Masyarakat suku asli juga dapat bersikap toleran dan inklusif melalui berbagai bentuk dialog kehidupan sosial.

Salah satu pelajaran yang penting adalah ketika masyarakat menghadapi perbedaan multietnik. Mereka terpenggil sendiri untuk memperlakukan agama dan budaya yang berbeda secara toleran. Interaksi mereka cenderung bersikap asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial yang bersifat asosiatif terjalin dengan cara memperkuat solidaritas dan gotong-royong antar etnik. Walaupun ada perbedaan budaya dan agama yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat, tetapi, masyarakat di kecamatan ini mampu menjalin hubungan sosial dengan baik melalui proses kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Hubungan sosial yang bersifat disosiatif dielola dengan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dari proses hubungan persaingan dan kontroversi.

Dengan pola hubungan seperti itu, kehidupan moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari cara mereka memandang relasi keragaman

etnis, agama, dan tradisi secara inklusif. Keberlangsungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka terbiasa dengan pola hubungan yang saling kooperatif dan akomodatif. Meskipun mereka berbeda secara budaya, namun mereka harus bekerjasama dalam wilayah yang harus mereka jaga. Pola hubungan antara penduduk lokal dan pendatang juga mendorong mereka untuk saling belajar satu sama lain dalam komunikasi antar budaya yang dialami secara langsung.

Kehidupan beragama dalam konteks keragaman etnis dan budaya tersebut diperkuat dengan proses pembinaan yang secara terus menerus dikampanyekan oleh seluruh stakeholder. Kampanye moderasi beragama yang disuarakan harus dilanjutkan dengan pengaturan agenda (setting agenda) dengan menentukan beberapa sasaran strategis. Pengaturan agenda juga perlu dilanjutkan dengan langkah-langkah strategis agar moderasi beragama menjadi arus utama dalam pemahaman dan sikap keagamaan masyarakat

### 3. Analisis Terbentuknya Moderasi Beragama Pada Masyarakat Multietnik Transmigrasi

Pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi menampilkan pola tertentu yang melibatkan banyak komponen, diantaranya:

Pertama, kebijakan transmigrasi melahirkan perkembangan masyarakat yang melibatkan tidak hanya suku asli, tetapi juga kedatangan etnis Jawa, Bali, dan Sasak Lombok. Saat ini, sudah terjadi campur aduk dan kedatangan beberapa etnis lain yang juga menetap. Semua merupakan subyek moderasi beragama yang secara inheren berinteraksi secara sosial dengan masyarakat lintas etnis yang ada di sana.

Kedua, subyek moderasi beragama juga sekaligus berperan sebagai subyek pembinaan yang berlangsung di sini. Dalam dinamika pembinaan moderasi beragama di kecamatan ini, pola yang dibangun menggunakan pendekatan partisipasi, kemitraan, dan keswadayaan



atau kerelaan. Semua pendekatan tersebut bertujuan mempromosikan semangat kebersamaan yang sinergis dalam membangun harmoni beragama.

Ketiga, pendekatan ini berlangsung secara bergantian. Dalam pembinaan moderasi beragama, pendekatan partisipatif dilakukan untuk meningkatkan peran setiap elemen masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi di balai desa dan kecamatan, para pemimpin agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, aparat desa, dan perwakilan lembaga pendidikan turut berpartisipasi. Partisipasi ini diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial bersama dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, sehingga terbentuk masyarakat multietnik transmigrasi yang moderat.

Pendekatan partisipasi masyarakat dalam banyak kegiatan terbukti cukup efektif untuk menanamkan ajaran moderasi Islam. Tidak hanya dalam program pembinaan moderasi beragama, pendekatan partisipasi masyarakat juga banyak dilakukan dalam program pemberdayaan ekonomi, perubahan iklim, pengarusutamaan gender, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Namun, partisipasi sejumlah komunitas dalam konteks masyarakat multietnik transmigrasi memiliki pola tersendiri di mana masyarakat pendatang harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan sensitivitas budaya masyarakat suku asli. Meskipun partisipasi dapat mencairkan komunikasi sosial, masyarakat tetap harus menjaga agar benturan tradisi dan asal usul kedaerahan tidak menjadi sumber ketegangan etno-kultural.

Pada pendekatan kemitraan, pembinaan moderasi beragama tidak cukup hanya mengandalkan partisipasi masyarakat secara kultural. Mereka juga harus menjalin kemitraan dengan sebanyak mungkin mitra strategis. Di antara mitra yang dimiliki masyarakat adalah mitra sekolah, lembaga sosial keagamaan, pemerintah kecamatan dan desa, CSR perusahaan, dan Kementerian Agama. Kemitraan ini tidak

hanya sebatas relasi kultural, tetapi juga diikat oleh satu kesepakatan bersama bahwa pembinaan moderasi beragama merupakan agenda bersama untuk kedamaian semua umat beragama.

Kemitraan tidak hanya penting dalam lingkup masyarakat, melainkan juga memerlukan adanya yang disebut sebagai kemitraan pedagogis. Kemitraan pedagogis ini menjadi esensial dalam meningkatkan strategi pembinaan yang dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, kemitraan dapat mendukung promosi moderasi beragama secara berkesinambungan di berbagai tempat. Pentingnya kemitraan juga tercermin dalam konteks sekolah, yang tidak hanya bermitra dengan institusi formal, tetapi juga membangun kemitraan yang erat dengan keluarga dan masyarakat.

Kemitraan ini didukung dengan penerapan pendekatan gender. Peran perempuan dalam pembinaan moderasi berkembang secara dinamis dan meluas cakupannya, mengingat perempuan memiliki banyak peran di berbagai sektor. Majelis taklim turut diramaikan oleh jamaah perempuan, menjadi modal penting dalam kampanye moderasi beragama di komunitas perempuan dan lingkungan keluarga.

Partisipasi dan kemitraan yang digunakan dalam pembinaan moderasi beragama juga didukung oleh pendekatan kerelaan atau keswadayaan masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai program masyarakat multietnik transmigrasi, seperti event kultural, perayaan hari besar agama, bakti sosial, dan amal kemanusiaan lintas agama dan etnis. Semua ini turut mendukung perkembangan kehidupan sosial keagamaan yang moderat.

Keswadayaan masyarakat seringkali menjadi solusi utama ketika mereka menghadapi berbagai masalah. Bahkan, keswadayaan dapat dianggap sebagai solusi efektif dan energi personal yang mendukung berbagai program kemasyarakatan, berasal dari akar rumput dan seringkali efektif dalam mendukung program negara. Sebagai contoh nyata, saat masyarakat dihadapkan pada wabah Covid-19,

mereka saling membantu dengan kerelaan dan gotong royong tanpa menunggu uluran kasih, yang pada akhirnya menjadi indikator percepatan pemulihan ekonomi nasional dan global.

Pendekatan di atas menunjukkan efektivitas kegiatan pembinaan moderasi beragama di Simpang Raya. Pendekatan ini didukung oleh manajemen pengelolaan program yang mendasarkan pada prinsip musyawarah, melibatkan semua stakeholder, menjunjung tinggi transparansi kegiatan, dan terbuka untuk semua etnis. Manajemen pengelolaan ini diimplementasikan dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan program pembinaan. Dengan pendekatan dan manajemen yang baik, beberapa kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan saling menghargai antar etnik dan agama, serta mempromosikan sikap beragama yang moderat melalui partisipasi aktif masyarakat.

Melalui sosialisasi yang masif dan kegiatan kreatif, masyarakat dapat membentuk kesadaran saling menghormati, bekerjasama, dan meningkatkan keagamaan secara moderat. Dengan dukungan dari sistem teknis lainnya, masyarakat multietnik transmigran dapat mengembangkan pandangan, sikap, kesadaran, dan perilaku beragama yang moderat.

Secara lebih rinci, hasil dari pola pembinaan tersebut dapat diidentifikasi melalui sejumlah pencapaian yang telah terealisasi, antara lain:

a. Menguatnya dialog antarumat beragama

Pola pembinaan moderasi beragama dapat lebih memperkuat dan memaksimalkan dialog antarumat beragama dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjalin kemitraan dengan semua komponen, terutama melibatkan tokoh-tokoh lintas agama. Dialog antaragama ini memiliki potensi besar sebagai modal penting untuk memperkuat kerjasama dan mempromosikan kerja sosial kemanusiaan. Dialog yang terbuka dan intensif tidak hanya dapat mengurangi ketegangan, tetapi juga

dapat menjadi titik awal untuk kerja-kerja sosial kemanusiaan lainnya. Selain itu, dialog ini juga dapat membuka pintu bagi pembahasan berbagai permasalahan di luar ranah keagamaan.

- b. Meningkatkan sikap saling menghargai antar etnis  
Seiring dengan semakin beragamnya etnis yang mendiami Simpang Raya, pola pembinaan yang telah diterapkan dianggap memadai untuk memperkuat sikap saling menghargai antar etnis. Bahkan, terjadi kerjasama saling melengkapi antara etnis pendatang dan etnis asli. Pembinaan moderasi dianggap sebagai solusi yang efektif untuk memajukan kehidupan beragam etnis di kecamatan tersebut.
- c. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis  
Moderasi beragama menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana berbagai kelompok agama dapat hidup bersama secara damai. Hal ini akan menciptakan atmosfer yang lebih positif bagi pertukaran budaya dan pemahaman antarumat beragama. Pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi ini terbukti dapat meningkatkan harmoni sosial, dan kenyataan ini harus terus dipertahankan agar potensi konflik antar etnis dapat dicegah sedini mungkin, serta untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar mereka.
- d. Meningkatkan rasa kebangsaan  
Pola pembinaan moderasi beragama juga dapat meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat transmigran. Keterlibatan dalam beberapa acara peringatan hari besar nasional, seperti peringatan hari kemerdekaan, upacara, dan lainnya, membuktikan bahwa pembinaan tersebut mampu memperkuat ikatan dalam satu identitas nasional di tengah keragaman yang mereka miliki.



# BAB VIII

## Konklusi Kajian

---

Jadi, kesimpulan dari Moderasi beragama pada masyarakat multietnik dan transmigrasi, akan diuraikan dibawah ini:

1. Analisis Perkembangan Masyarakat Multietnik Transmigrasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial Keagamaan Inklusif, dapat disimpulkan bahwa dinamika sosial keagamaan di daerah transmigrasi menunjukkan pola perubahan yang menarik. Melalui program transmigrasi, terjadi bermacam-macam etnis yang bersatu dalam satu wilayah, menciptakan keanekaragaman budaya dan keagamaan yang potensial untuk konflik. Namun, melalui pendekatan moderasi beragama, masyarakat transmigrasi berhasil membangun harmoni dan kesejahteraan bersama.

Pentingnya pembinaan moderasi beragama terlihat dalam keberhasilan masyarakat multietnik transmigrasi dalam membangun kesadaran saling menghargai dan bekerja sama antar-etnis. Keterlibatan tokoh agama, pemerintah, dan lembaga pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk sikap moderat yang mampu mengatasi potensi konflik dan meningkatkan kerjasama lintas agama. Adanya dialog antarumat beragama juga menjadi sarana penting untuk memperkuat kerjasama sosial kemanusiaan, menciptakan lingkungan harmonis, dan meminimalisir ketegangan.

Pola pembinaan moderasi beragama tidak hanya mempengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan

identitas nasional di tengah keragaman masyarakat transmigrasi. Keterlibatan dalam peringatan hari besar nasional dan kegiatan bersama menunjukkan bahwa pembinaan moderasi beragama dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti pendekatan partisipatif, kemitraan, keswadayaan, dan dialog menjadi kunci keberhasilan dalam membina moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi.

2. Analisis Dinamika Moderasi Beragama Di Masyarakat Multietnik Transmigrasi dapat disimpulkan bahwa upaya moderasi beragama memainkan peran krusial dalam membentuk harmoni sosial dan keberagaman di lingkungan transmigrasi. Dinamika yang kompleks dalam masyarakat multietnik transmigrasi menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya sekadar strategi untuk mengelola keragaman keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas, saling pengertian, dan integrasi di antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda.

Pentingnya peran tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam membimbing dan mendorong moderasi beragama menjadi sorotan utama. Mereka tidak hanya berperan dalam menyampaikan ajaran moderasi, tetapi juga dalam membina dialog antarumat beragama, mempromosikan inklusivitas, dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk kerjasama lintas etnis.

Dinamika pembinaan moderasi beragama di masyarakat transmigrasi juga menciptakan keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan partisipatif, kemitraan, dan keswadayaan. Melalui kegiatan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima ajaran moderasi, tetapi juga aktor yang turut serta dalam membangun harmoni dan solidaritas. Kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan tokoh agama, menjadi fondasi kuat dalam membina moderasi beragama.

Keswadayaan masyarakat sebagai bagian dari pembinaan moderasi beragama menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut telah meresap dalam kehidupan sehari-hari. Sikap inklusif, saling menghargai, dan kerjasama antar-etnis menjadi modal penting dalam menciptakan masyarakat yang moderat dan damai. Dengan demikian, analisis dinamika moderasi beragama di masyarakat multietnik transmigrasi menggambarkan sebuah proses yang tidak hanya mengelola perbedaan keagamaan, tetapi juga membentuk identitas sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Analisis Terbentuknya Moderasi Beragama Pada Masyarakat Multietnik Transmigrasi menunjukkan bahwa proses pembentukan sikap moderat dalam kehidupan beragama merupakan hal yang kompleks dan memerlukan keterlibatan multi-stakeholder. Masyarakat transmigrasi, yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang keagamaan, berhasil membentuk solidaritas dan harmoni melalui pendekatan moderasi beragama.

Peran aktif pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan menjadi pilar utama dalam membina moderasi beragama. Dialog antarumat beragama, kegiatan partisipatif, dan kemitraan dengan berbagai pihak membentuk landasan yang kokoh untuk terbentuknya sikap yang moderat. Melalui pendekatan ini, masyarakat transmigrasi tidak hanya memahami dan menghargai perbedaan keagamaan, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam menjaga kedamaian dan kerukunan.

Dinamika keterlibatan perempuan dalam pembinaan moderasi beragama menjadi aspek penting dalam menciptakan dampak yang luas. Perempuan tidak hanya berperan dalam forum keagamaan, tetapi juga dalam keluarga dan komunitas, memainkan peran sentral dalam mendukung nilai-nilai moderasi. Ini mencerminkan bahwa inklusivitas dan kesetaraan gender turut menjadi bagian integral dari proses pembentukan moderasi beragama.



Selain itu, pendekatan keswadayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan kultural, bakti sosial, dan amal kemanusiaan menunjukkan bahwa nilai moderasi beragama tidak hanya ditanamkan dalam bentuk ajaran formal, tetapi juga meresap dalam kehidupan sehari-hari. Keswadayaan ini mencerminkan komitmen masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif.

Secara keseluruhan, analisis terbentuknya moderasi beragama pada masyarakat multietnik transmigrasi menggambarkan bahwa pembinaan moderasi bukan hanya tentang menciptakan toleransi, tetapi juga melibatkan proses pembentukan sikap inklusif, dialog terbuka, dan kerjasama lintas etnis. Masyarakat transmigrasi berhasil menciptakan identitas sosial yang moderat, memperkuat rasa kebangsaan, dan menjaga kedamaian dalam keragaman agama dan budaya.

## Daftar Pustaka

---

- Bank, Magnus. 2005. *Ethnicity: Anthropological Constructions*. New York: Routledge
- Chinmayee Mishra and Navaneeta Rath, 2021. "Social Solidarity during a Pandemic: Through and beyond Durkheimian Lens," *Social Sciences & Humanities Open* 2, no. 1 (2020): 100079; George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, *Modern Sociological Theory* (Sage publications)
- Cohen, A.Y., 1970. *Schools and Civilizational States, dalam The Social Sciences and The Comparative Study of Education systems*. (Joseph Fischer; editor). Pennsylvania: International Textbook Company.
- Direktorat KSKK Madrasah, 2002. *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin*. Dirrektorat KSKK Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia
- Du Bois, 1903. *The Souls of Black Folk*, USA: Oxford University Press
- Geertz, Clifford, 1992. *Politik Kebudayaan (terjemahan)*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern, Terj. Saut Pasaribu dkk*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 131-135.
- H. Kallen, "Democracy Versus the Melting Pot: A Study of American Nationality," *Journal of Race Development*, no. 15 (1924): 1-12.

- Hadjisarosa, P. 1988. *Regional Development dalam Birowo dkk (eds) Settlement Concept As An Integrated Part of Regional and Rural Development*. Jakarta. Mercu Buana University
- Haryanto, “Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam Dalam Relasi Etnisitas Dan Agama Di Kalteng.” *Jurnal Analisa*, Volume 20 Nomor 01 Juni 2013
- Ihsan, I., & Abdullah, I. 2021. *Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529
- Issacs, Harold R., 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik (terjemahan)*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Johnson, Doyle Paul. 1994 *Teori Sosial Klasik dan Modern*. Terj. Robert. M.Z. Lawang, (Gramedia Pustaka Utama
- Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur’anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press
- Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015. *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Ke Depan*, (Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukimanmn Trasnigrasi Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi.
- Kementerian Agama RI, 2019. *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC)
- Kementerian Agama RI, 2019. *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Knapp, C. A., and Knapp, 2001. *The Effects of Experience and Explicit Fraud Risk Assessment in Detecting Fraud with Analytical Procedures*. *Accounting, Organizations and Society*,

- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta: Akasara Baru.
- M. Nur Ghufron, dkk, 2020. *Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach, Religions*
- Ma'arif, Syamsul. 2020. *Sekolah Harmoni Restorasi Pendidikan Moderasi Pesantren*. Wonogiri: CV Pilar Nusantara
- Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2019),
- Martono, Nanang. 2014. *Sosisolgi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern Dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Pidarta, M., 1997. *Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital". in J. Richardson (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York, Greenwood), 241-258. *Contemporary Sociology* (1987) 16(4)
- Qasim, Muhammad. 2020. *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Gowa: Alauddin University Press
- Qomar, Mujamil. 2021. *Moderasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Ritzer and Stepnisky, 2018. *Modern Sociological Theory*; Lisa Herzog, "Durkheim on Social Justice: The Argument from 'Organic Solidarity,'" *American Political Science Review* 112, no. 1
- Rustiadi. Ernani, dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Shihab, Quraish. 2020. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati
- Sumardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Jakarta: Komunitas Bambu
- Sztompka, 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenanda

Tajfel, H., & Turner, 1979. An Integrative Theory of Intergroup Conflict  
(*The Sosial Psychology of Intergroup Relations*)

Yapi Taum, Y. (2006). Masalah-masalah sosial dalam masyarakat multietnik.

Yusuf, Ali Anwar. 2002. *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka Setia

# Moderasi Beragama

pada Masyarakat Multietnik dan Transmigrasi

Dalam dinamika keragaman sosial yang melibatkan masyarakat multietnik dan transmigrasi, konsep moderasi beragama memegang peran penting sebagai landasan yang mendasari kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif. Moderasi beragama tidak hanya menjadi sebuah strategi, melainkan juga sebuah filosofi yang menggambarkan kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan beragama di tengah pluralitas budaya dan etnis. Sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman yang mendalam, toleransi, dan saling penghormatan antarberagama, moderasi beragama menjadi perekat sosial yang kuat, memungkinkan masyarakat multietnik dan transmigrasi untuk hidup bersama dalam keberagaman tanpa kehilangan esensi khas budaya dan keberagaman agama masing-masing.

Dalam konteks masyarakat multietnik, moderasi beragama bukan hanya tentang mengelola perbedaan keyakinan, tetapi juga menggali potensi keberagaman sebagai sumber kekuatan bersama. Dengan merangkul prinsip-prinsip moderasi beragama, masyarakat dapat mengatasi potensi konflik dan membangun fondasi yang kokoh untuk kerja sama lintas etnis dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga urusan sosial. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan pola pembinaan moderasi beragama di masyarakat multietnik dan transmigrasi, seperti yang dicontohkan dalam studi kasus di Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, tidak hanya menjadi suatu inovasi lokal, tetapi juga kontribusi berharga dalam menghadapi tantangan global terkait kerukunan antarumat beragama dan keberlanjutan hidup bersama dalam keragaman.

